



**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI
SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI
JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:
Bima Adi Prawira
140810101008

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI
SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI
JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**Bima Adi Prawira
140810101008**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018
PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Luluk Latifah dan Ayahanda Siswono tercinta, yang senantiasa tulus memberikan do'a dan dukungan dari bangku Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, sehingga ananda bisa mencapai cita-cita yang diharapkan.
2. Kakak-Kakakku tersayang Maharani Martanita, Noval Aditya Rizky, dan Vendy Triatna Lukwono yang senantiasa memberi do'a, dukungan, dan motivasi.
3. Bapak/ Ibu Guru yang telah memberikan ilmu dan mendidik dengan tulus, penuh keikhlasan serta kesabaran dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi.
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

MOTTO

“Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan?”

(Terjemahan Q.S Ar Rahman: 13)

“Saya datang, saya lihat, saya menang”

Veni, Vidi, Vici

(Gaius Julius Caesar)

“Hidup adalah rentetan drama sandiwara dimana Tuhan adalah sutradaranya dan manusia adalah aktor utamanya”

(Bima Adi Prawira)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bima Adi Prawira

NIM : 140810101008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Mei 2018

Yang menyatakan,

Bima Adi Prawira
NIM 140810101008

SKRIPSI

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI
SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI
JAWA TIMUR**



Oleh:

Bima Adi Prawira

140810101008

Pembimbing

Dosen Pembimbing I

: Drs. Agus Luthfi, M. Si

Dosen Pembimbing II

: Dr. Regina Niken Wilantari S.E., M.Si

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Nama Mahasiswa : Bima Adi Prawira

NIM : 140810101008

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan : 05 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Agus Luthfi, M. Si
NIP. 196505221990021001

Dr. Regina Niken Wilantari S.E., M.Si
NIP. 197409132001122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes
NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN
INVESTASI SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Bima Adi Prawira

NIM : 140810101008

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

16 Juli 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs. Badjuri, M.E. (.....)
NIP. 19531225 198403 1 002
2. Sekretaris : Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes. (.....)
NIP. 19641108 198902 2 001
3. Anggota : Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P. (.....)
NIP. 19720713 199903 1 001

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Foto 4 X 6
warna

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.
NIP. 19710727 199512 1 001

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur

Bima Adi Prawira

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Suatu perekonomian dapat dikatakan berkembang apabila pendapatan per kapita suatu wilayah menunjukkan kecenderungan naik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel tahun 2012-2015 pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan investasi swasta berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien pengeluaran pemerintah dan investasi swasta pada masing-masing Kabupaten/Kota berbeda nilainya, hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya pemerataan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta.

Kata Kunci: pengeluaran pemerintah, investasi swasta, dan pertumbuhan ekonomi

The Effect of Government Expenditure and Private Investment on Economic Growth in East Java Province

Bima Adi Prawira

Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics and Business, University of Jember

ABSTRACT

One important benchmark in determining the success of economic development is economic growth that illustrates a real impact of development policies implemented. An economy can be said to grow if the per capita income of a region shows an upward trend. This study aims to determine the effect of government expenditure and private investment on economic growth in East Java Province. The analysis method used in this research is panel data of 2012-2015 in 38 regencies / cities in East Java with Fixed Effect Model (FEM) approach. Based on the results of the analysis, shows that government expenditure variable has a positive and significant impact on economic growth. While private investment has positive but insignificant effect on economic growth. The coefficient of government expenditure and private investment in each regency / city is different in value, this indicates that the lack of equitable investment by both government and private sector.

Keywords: *government investment, public investment and economic growth*

RINGKASAN

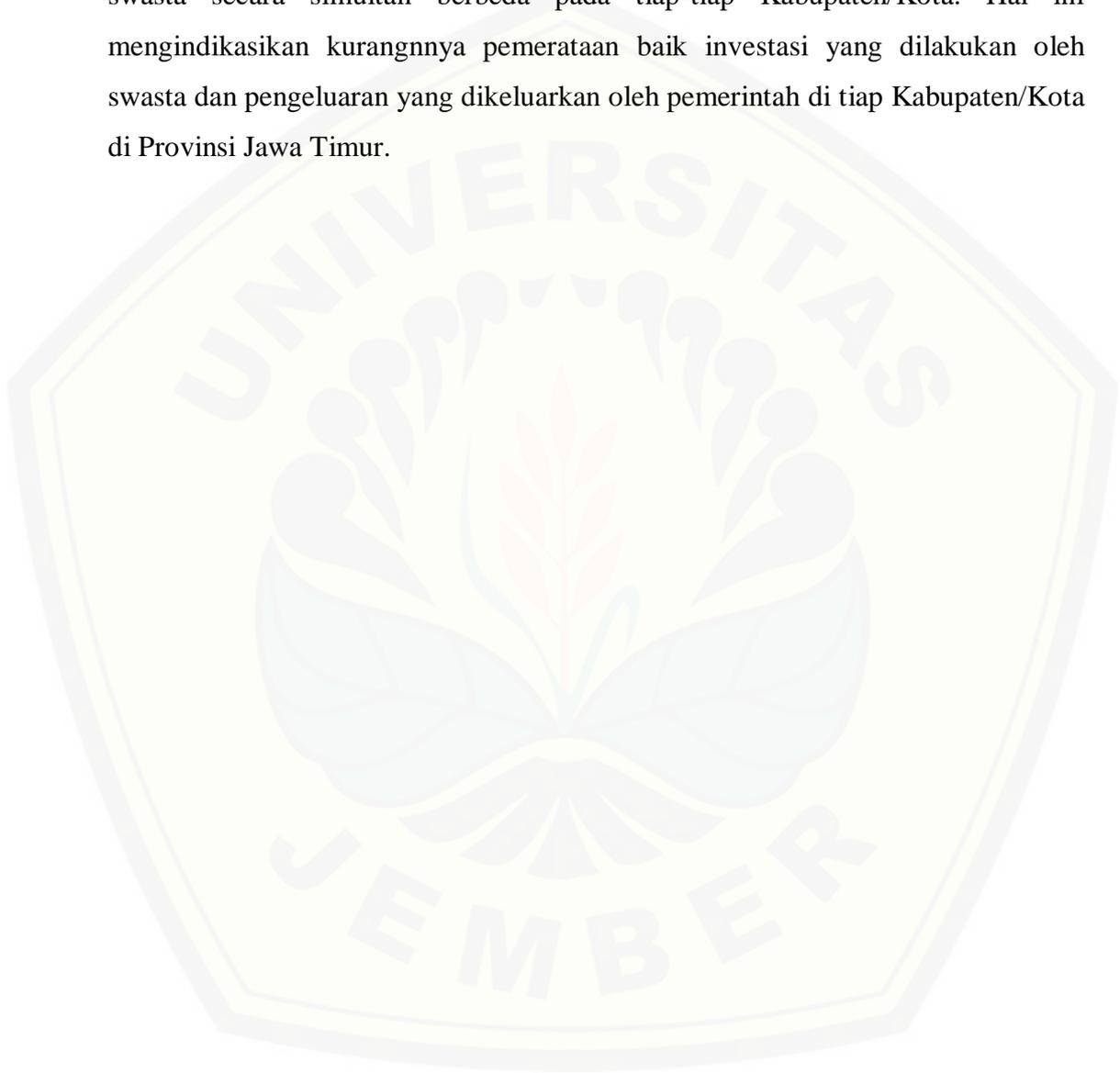
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur; Bima Adi Prawira; 140810101008; 78 halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam pertumbuhan ekonomi biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sarana dan prasarana produksi.

Suatu perekonomian dapat dikatakan berkembang apabila pendapatan per kapita suatu wilayah menunjukkan kecenderungan naik terus menerus. Pertumbuhan ekonomi bersifat dinamis, artinya adakalanya pertumbuhan ekonomi berkembang dengan cepat dan adakalanya pula pertumbuhan ekonomi itu mengalami kemunduran, bahkan mencapai angka minus dan menyebabkan perekonomian mengalami kondisi stagnasi. Rostow mengemukakan bahwa setiap upaya untuk tinggal landas mengharuskan akan adanya mobilisasi dana tabungan dalam dan luar negeri yang bertujuan untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sehingga kesempatan kerja meningkat, dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi atas meningkatnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dan bagaimana peranan pengeluaran pemerintah dan investasi swasta secara simultan pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS) menggunakan data panel tahun 2012 – 2015 pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah

dan investasi swasta secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Namun secara parsial, investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Hasil koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah dan investasi swasta secara simultan berbeda pada tiap-tiap Kabupaten/Kota. Hal ini mengindikasikan kurangnya pemerataan baik investasi yang dilakukan oleh swasta dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah di tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Agus Luthfi, M. Si dan Ibu Dr. Regina Niken Wilantari, S.E., M. Si, selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan yang bermanfaat pada penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Sebastiana V., M. Kes, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan;
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Bapak Dr. I Wayan Subagiarta, M. Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama menjadi mahasiswa;
5. Seluruh Dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember, khususnya Jurusan IESP yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis sampai akhir penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Luluk Latifah dan Bapak Siswono yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, nasehat, dan kerja keras yang tidak pernah putus untuk penulis;
7. Kakak-Kakakku Maharani Martanita, Noval Aditya Rizky, Vendy Triatna Lukwono yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang hingga saat ini;

8. Sahabat-sahabatku tercinta, Nur Farkah, A. Afif Zulkarnain, Erlinda Dwi A., Rendy Aryanto, M. Try, Anindya Diah, Dinar Pradana S.P., dan Handy Prasetya terima kasih atas segala bantuan, doa, masukan serta semangat yang diberikan kepada penulis, serta terima kasih untuk kalian telah rela mendengarkan keluh kesah penulis selama menyusun skripsi;
9. Keluarga besar kos “Wisma Kartika Puspa”, kontrakan Pak Kumis, Keluarga besar IKMM Mojokerto terima kasih atas doa dan dukungannya;
10. Teman-teman tercinta angkatan 2014 Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;
11. Semua pihak yang telah memberikan sumbangan tenaga, semangat, dan pikiran yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini;

Penulis juga menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 04 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Adam Smith.....	9
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar.....	10
2.1.3 Teori Pertumbuhan Solow-Swan.....	13
2.1.4 Tahapan Pertumbuhan Ekonomi Rostow.....	13

2.2 Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi	14
2.3 Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi	19
2.3.1 Teori Pengeluaran Pemerintah Rostow dan Musgrave	21
2.3.2 Teori Adolf Wagner	22
2.3.3 Teori Peacock dan Wiseman	23
2.4 Pembangunan Ekonomi Daerah	Error! Bookmark not defined.
2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu	26
2.6 Kerangka Konseptual	29
BAB 3. METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Unit Analisis	30
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Metode Analisis Data	31
3.6 Uji Penentuan Model	34
3.6.1 Uji Chow (<i>Chow Test</i>)	34
3.6.2 Uji Hausman (<i>Hausman Test</i>)	34
3.7 Uji Statistik	35
3.7.1 Uji Signifikasi Simultan (Uji F)	35
3.7.2 Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t)	36
3.7.3 Koefisien Determinasi (Uji R^2)	37
3.8 Uji Asumsi Klasik	37
3.8.1 Uji Normalitas	38
3.8.2 Uji Multikolinearitas	38
3.8.3 Uji Heteroskedastisitas	39
3.9 Definisi Variabel Operasional	39
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum	41
4.1.1 Keadaan Geografis Wilayah Jawa Timur	41
4.1.2 Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Timur	42
4.2 Gambaran Umum Variabel	44

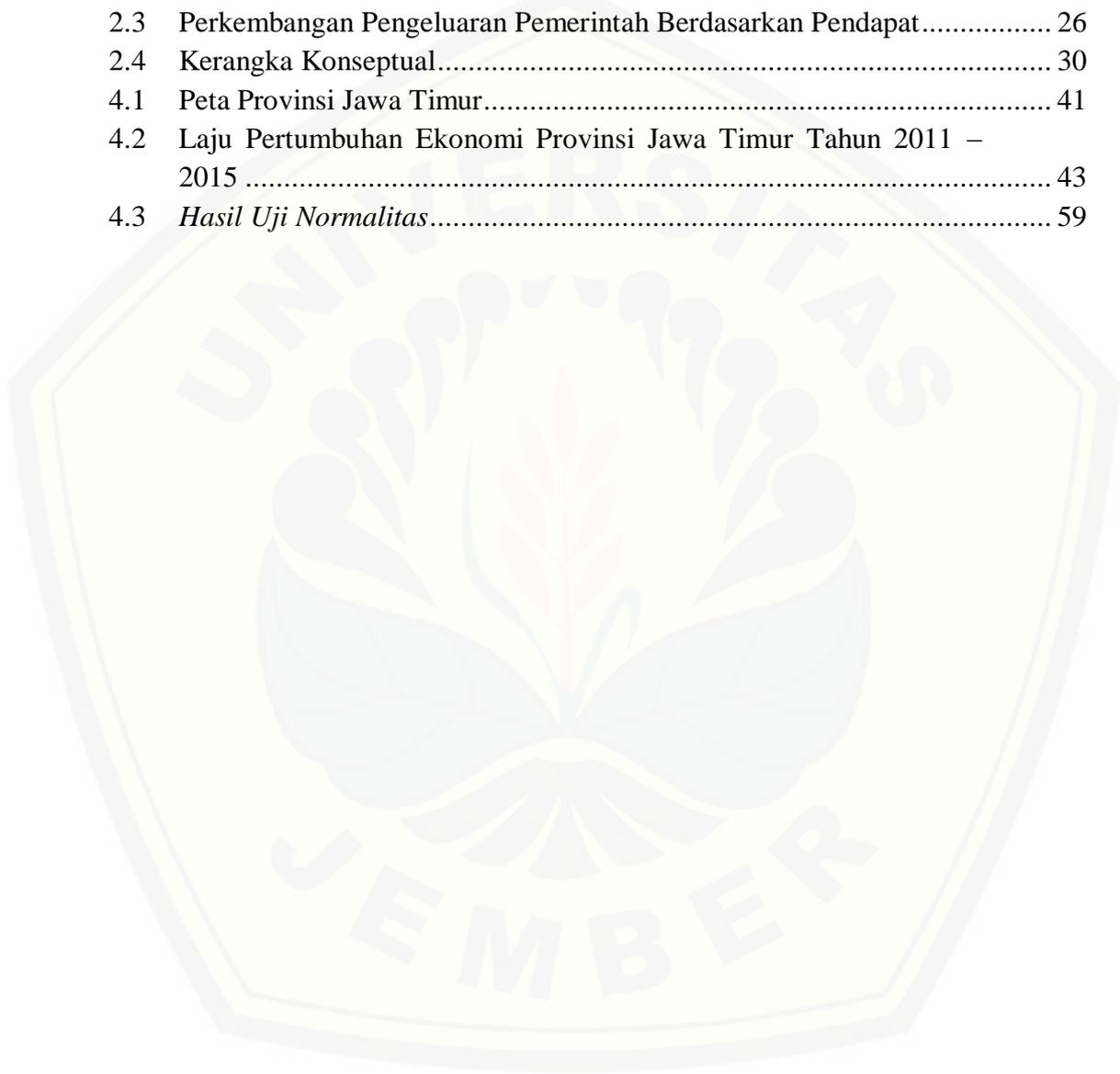
4.2.1	Gambaran Umum Variabel Dependent Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur	44
4.2.2	Gambaran Umum Variabel Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Timur	46
4.2.3	Gambaran Umum Investasi Swasta di Provinsi Jawa Timur	49
4.3	Hasil Analisis Data	52
4.3.1	Pengujian Model Data Panel	52
4.3.2	Analisis Regresi Data Panel	53
4.3.3	Uji Statistik	55
4.3.4	Uji Asumsi Klasik	58
4.4	Pembahasan	60
4.4.1	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur	62
4.4.2	Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur	65
BAB 5.	PENUTUP	68
5.1	Kesimpulan	68
5.2	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN		73

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional (Dalam Persen)	2
1.2 Realisasi Belanja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur (Juta Rupiah)	4
1.3 Perkembangan Investasi Swasta Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014 (Jutaan Rupiah)	5
4.1 Data Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015 (dalam persen).....	44
4.2 Kabupaten/Kota dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto tertinggi dan terendah tahun 2014 dan 2015	45
4.3 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015 (dalam persen).....	47
4.4 Kabupaten/Kota dengan nilai Pengeluaran Pemerintah tertinggi dan terendah tahun 2014-2015.....	48
4.5 Pertumbuhan Investasi Swasta Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015 Tahun 2012-2015(dalam persen)	50
4.6 Kabupaten/Kota dengan nilai investasi swasta tertinggi dan terendah tahun 2014-2015.....	51
4.7 Uji Chow	52
4.8 Uji Hausman.....	52
4.9 Hasil Analisis Regresi Data Panel dengan Pendekatan <i>Fixed Effect</i>	53
4.10 Koefisien Regresi Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	55
4.11 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	56
4.12 Hasil Uji Parameter Individual (Uji t)	56
4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	57
4.14 Hasil Uji Multikolinearitas.....	58
4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	59
4.16 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 – 2015 (dalam persen).....	66

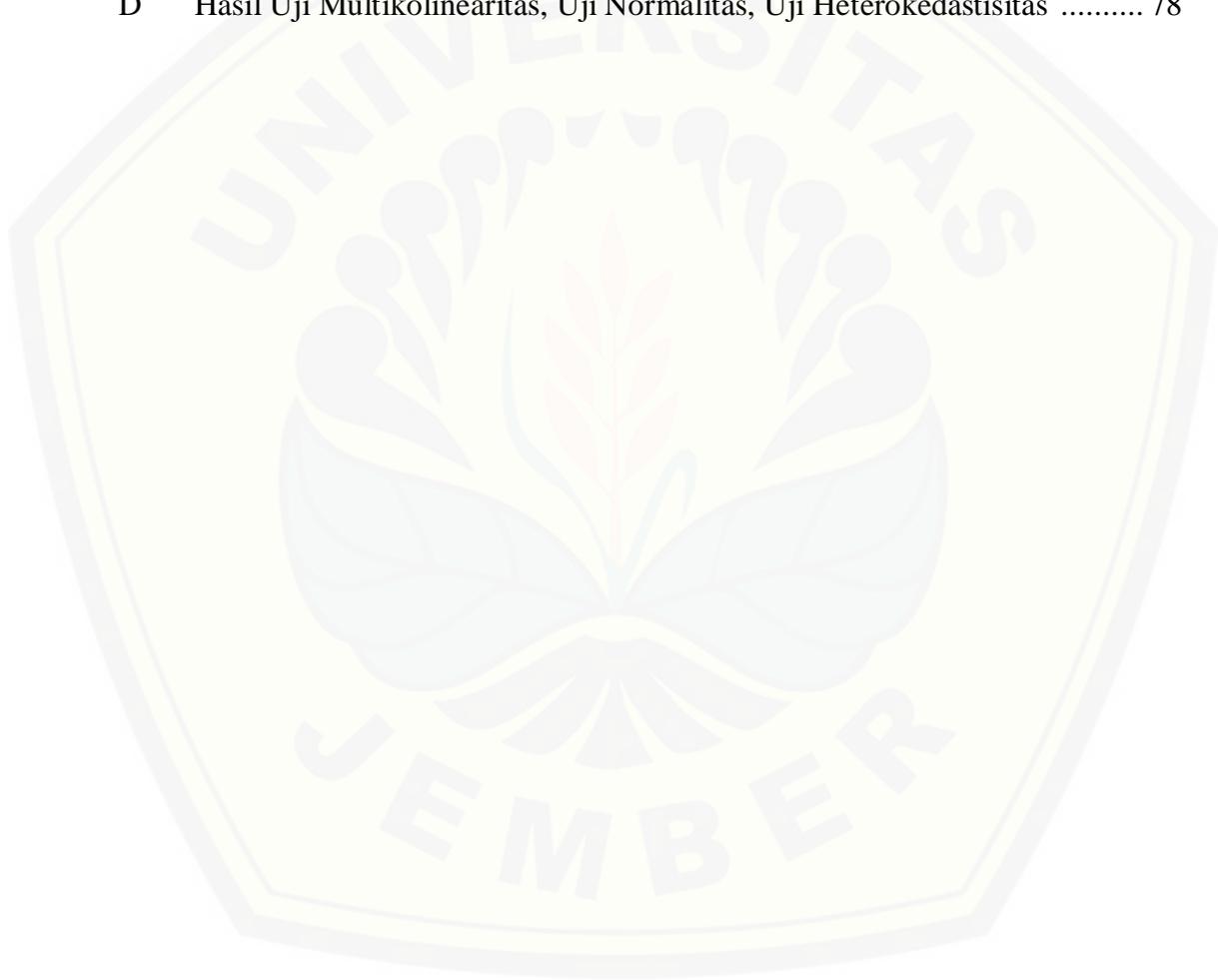
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner	23
2.2 Kurva Teori Peacock dan Wiseman	25
2.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Pendapat.....	26
2.4 Kerangka Konseptual.....	30
4.1 Peta Provinsi Jawa Timur.....	41
4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2015	43
4.3 Hasil Uji Normalitas.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A Data PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, Pengeluaran Pemerintah, dan Investasi Swasta Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015	73
B Hasil Analisis Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i>	76
C Hasil Uji <i>Chow</i> dan Hasil Uji <i>Hausman</i>	77
D Hasil Uji Multikolinearitas, Uji Normalitas, Uji Heterokedastisitas	78



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara selalu berusaha memacu tingkat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan karena memungkinkan masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa lebih banyak, dan menyumbang pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa sosial yang lebih besar seperti kesehatan, pendidikan dan sebagainya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan standar hidup.

Suatu perekonomian dapat dikatakan berkembang apabila pendapatan per kapita suatu wilayah menunjukkan kecenderungan naik terus menerus. Kekacauan politik dan ekonomi dapat mengakibatkan suatu perekonomian mengalami kemunduran dalam kegiatan ekonominya. Kalau keadaan tersebut hanya bersifat sementara dan kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun, maka masyarakat tersebut dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan dan pembangunan seringkali digunakan secara sinonim di dalam risalah ekonomi. Walaupun penggunaan ini kadang-kadang dapat diterima, namun bisa membingungkan. Kedua istilah tersebut bisa mempunyai arti yang berbeda, implisit dalam penggunaan umum dan eksplisit dalam apa yang mengikutinya. Secara khusus, *pertumbuhan* ekonomi berarti lebih banyak output. *Pembangunan* ekonomi menyatakan tidak hanya lebih banyak output tetapi juga lebih banyak macam output daripada yang diproduksi sebelumnya. (Herrick dan Kindlerberger, 1988).

Sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan dari besarnya nilai tambah Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala regional. Pertumbuhan ekonomi bersifat dinamis, artinya adakalanya pertumbuhan ekonomi berkembang dengan cepat dan adakalanya pula pertumbuhan ekonomi itu mengalami kemunduran, bahkan mencapai angka minus dan menyebabkan perekonomian mengalami kondisi stagnasi.

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata

dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam pertumbuhan ekonomi biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sarana dan prasarana produksi (Raharjo, 2006).

Pembangunan daerah adalah integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi daerah dalam peningkatan demokrasi dan kinerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan 1 daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten/Kota untuk bertindak sebagai penggerak, sedangkan pemerintah Provinsi sebagai koordinator yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. (Rustiono, 2004).

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional (Dalam Persen)

Uraian	2013	2014	2015	2016
Jawa Timur	6,08	5,91	5,44	5,55
DKI Jakarta	6,11	5,09	5,88	5,85
Jawa Barat	6,06	5,3	5,03	5,67
Jawa Tengah	5,81	5,18	5,4	5,28
DI Jogjakarata	5,4	5,47	4,94	5,05
Banten	5,86	5,02	5,37	5,26
Nasional	5,78	5,02	4,88	5,02
Kontribusi PDRB Jawa Timur terhadap Nasional (%)	14,99	14,16	14,36	14,44

Sumber: *Bappeda Provinsi Jawa Timur*

Berdasarkan Tabel 1.1, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat dikategorikan tertinggi di Pulau Jawa. Namun, pertumbuhannya

mengalami penurunan dari 6,08% pada tahun 2013, turun menjadi 5,91% pada 2014, kemudian turun lagi menjadi 5,44% pada 2015 dan pada 2016 menjadi 5,55%. Hal ini sebenarnya harus diperhartikan lagi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengapa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami penurunan. Tetapi, meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami penurunan, kontribusi PDRB Jawa Timur terhadap Nasional masih tergolong tinggi. Dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, Jawa Timur berkontribusi sebesar 14,99% pada tahun 2013 meskipun mengalami penurunan terus menerus menjadi 14,44% pada tahun 2016. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang cukup memiliki kekuatan atau potensi ekonomi dikarenakan pertumbuhan ekonominya yang bisa dikatakan tertinggi se-provinsi di Pulau Jawa serta kontribusi PDRB yang tinggi terhadap nasional..

Provinsi Jawa Timur yang terdiri atas 38 kabupaten/kota memiliki latar belakang yang berbeda pada tiap-tiap wilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda di setiap wilayah di Provinsi Jawa Timur. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi atau wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar (*trickle down effect*) (Suryanto, 2011).

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah mengubah konsep dan kewenangan daerah yang ada selama ini. Undang-undang ini memiliki makna substansial dalam pemberian kewenangan daerah yang semula ditujukan atas dasar porsi kebijakan pusat yang menonjol dalam pembagian kewenangan pusat-daerah selanjutnya diarahkan menjadi kemandirian daerah 4 dalam mengelola kewasannya termasuk

kebijakan-kebijakan pembiayaan. Konsekuensi logis dari hal tersebut berdampak terhadap kemajuan perekonomian daerah yang pada akhirnya terciptanya peningkatan pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu sudah menjadi tuntutan daerah untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Salah satu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah yaitu melalui kebijakan pengeluaran pemerintah. Kebijakan yang diproyeksikan dalam nilai APBD ini memerlukan perhatian lebih, terutama dalam pendistribusian anggaran tersebut. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah daerah dapat diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan oleh pemerintah dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah (Raharjo, 2006).

Tabel 1.2 Realisasi Belanja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur (Juta Rupiah)

Pos Belanja	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Belanja Operasi	6,683,721	9,873,860	11,434,703	11,408,154
Belanja Modal	1,045,362	1,057,365	1,175,751	1,207,457
Belanja Tidak Terduga	45,023	51,032	60,252	93,319
Total	7,774,106	10,982,257	12,670,706	12,708,930
Pertumbuhan (%)		0.413	0.154	0.003

Sumber: DPJKP-Kemenkeu (diolah)

Berdasarkan tabel 1.2, belanja pemerintah daerah didominasi yang pertama adalah belanja operasi kemudian belanja modal. Sedangkan belanja tidak terduga memiliki proporsi rendah dalam belanja daerah. Dalam kurun waktu 2011-2014, secara parsial Provinsi Jawa Timur pertumbuhan belanja daerah rata-rata sebesar 0,19%. Menurut Rustiono (2008), apabila proporsi belanja modal lebih rendah dibandingkan belanja operasi, berarti bahwa alokasi anggaran belanja sebagian besar digunakan untuk kepentingan konsumtif. Berdasarkan uraian tersebut, tidak

dapat dihindari bahwa suatu belanja operasi pada tiap anggaran pemerintah selalu lebih besar dari belanja modal atau konsumtif. Namun, pola alokasi anggaran yang dirasa konsumtif akan berdampak kurang baik terhadap perekonomian.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah, atau lebih umumnya adalah ukuran dari sektor publik, menjadi subjek penting untuk dianalisis. kontroversi utama adalah dapatkah sektor publik menanikkan dalam jangka panjang tingkat pertumbuhan ekonomi. Secara umum gambaran pengeluaran publik, yaitu infrastruktur fisik atau pembangunan manusia, dapat meningkatkan pertumbuhan tetapi dari segi keuangan khususnya pengeluaran dapat memperlambat pertumbuhan. Secara umum dampaknya tergantung dari *trade-off* antara pengeluaran publik yang produktif dan efek pajak yang bersifat distortif (Sodik, 2007).

Dalam mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi, ada banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah selain kebijakan anggaran, salah satunya adalah peningkatan investasi. Seperti dijelaskan dalam dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah investasi. Ada beberapa hal yang sebenarnya berpengaruh dari hal investasi ini. Investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). (Rustiono, 2008).

Tabel 1.3 Perkembangan Investasi Swasta Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2011	290,661,722	0.25
2012	350,394,825	1.51
2013	475,612,705	2.05
2014	337,331,587	1.45

Sumber: Bank Indonesia dan BKPM Provinsi Jawa Timur (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3, investasi swasta di Provinsi Jawa Timur dari mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2011, pertumbuhan investasi swasta sebesar 0,25%. Kemudian pada tahun 2014, pertumbuhan investasi naik

menjadi 1,45%. Hal ini menyimpulkan bahwa, dalam kurun waktu 2011-2014 pertumbuhan investasi swasta sebesar 1,2%. Dengan bertumbuhnya investasi swasta di provinsi Jawa Timur, mengindikasikan bahwa banyak modal dari swasta yang masuk atau berkembang.

Investasi baru yang ditanamkan pada prinsipnya bersumber dari dana pemerintah ataupun swasta. Peranan pemerintah (baik pusat maupun daerah) dalam investasi baru ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah melalui pengalokasian belanja atau pengeluaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Pihak swasta juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi ataupun akumulasi modal yang dikeluarkan pihak swasta akan menjadi input ke berbagai sektor perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan PDRB (Siddik, 2009).

Berdasarkan pentingnya pengeluaran pemerintah dan investasi swasta bagi pertumbuhan ekonomi utamanya perekonomian, sehingga penulis menganalisa adanya fenomena yang cukup menarik yaitu apakah ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan naik atau turunnya pengeluaran pemerintah dan investasi swasta di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, juga menganalisa bagaimana peran pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Investasi bisa saja menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Dengan investasi tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan ekonomi yaitu seperti kemiskinan dan pengangguran. Peran pemerintah dalam suatu perekonomian juga dipertimbangkan, hal ini dengan ditunjukkan dari nilai pengeluaran pemerintah. Selain itu, tingginya suatu investasi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang menganggur serta mengentaskan kemiskinan yang mana hal tersebut adalah suatu permasalahan pokok dalam suatu perekonomian. Guna mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga berikut adalah rumusan yang akan dibahas dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
- b. Bagaimana pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
- c. Bagaimana pengaruh koefisien pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan berbagai latar belakang permasalahan diatas, dengan batasan tertentu, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
- b. Untuk mengetahui pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
- c. Untuk mengetahui pengaruh koefisien pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- a. Bagi akademisi, bisa menjadi tambahan wawasan, gagasan, ataupun pengetahuan tentang pengeluaran pemerintah, investasi swasta, dan tingkat partisipasi angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
- b. Selaku pemangku kebijakan, pemerintah bisa menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan terkait peningkatan ekonomi di suatu wilayah tersebut.
- c. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, apabila melakukan penelitian yang terkait dengan permasalahan yang sama sehingga dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya, ataupun juga dijadikan pembanding dengan penelitian lainnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Adam Smith

Menurut Arsyad (1997), Adam Smith adalah tokoh ekonom pertama yang memperhatikan lebih terhadap masalah pertumbuhan ekonomi. Dalam bukunya *An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776) mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Salah satu proses pertumbuhan Adam Smith yaitu:

a. Pertumbuhan Output Total

Unsur – unsur pokok dalam sistem produksi suatu Negara menurut Adam Smith ada tiga, yaitu:

- 1) Sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi) yaitu sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling utama dari kegiatan produksi suatu masyarakat dan merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan ekonomi. Artinya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan output. Pertumbuhan output tersebut dapat berhenti jika sumber daya alam tersebut sudah habis atau digunakan secara penuh.
- 2) Sumber daya manusia (jumlah penduduk) mempunyai peranan pasif dalam proses pertumbuhan output maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.
- 3) Stok barang dan modal yang ada semakin besar dapat melakukan spesialisasi dan pembagian kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas.

Menurut Adam Smith, stok kapital mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap tingkat output total. Pengaruh langsung stok capital terhadap tingkat output total yaitu penambahan stok capital (yang diikuti penambahan tenaga kerja) akan meningkatkan tingkat output total, dengan begitu semakin banyak input maka semakin banyak output yang dihasilkan. Pengaruh tidak langsung stok capital terhadap tingkat output total yaitu peningkatan produktivitas per kapita melalui dimungkinkannya tingkat spesialisasi dan pembagian kerja

yang tinggi. Sehingga semakin besar stok capital, maka semakin besar kemungkinan spesialisasi dan pembagian kerja, dan diikuti semakin tingginya produktivitas per pekerja. Selain itu, ada dua faktor penunjang penting dibalik proses akumulasi modal dalam terciptanya pertumbuhan output, yaitu: (1) Makin meluasnya pasar, (2) Adanya tingkat keuntungan diatas keuntungan maksimal. (Sukirno, 2000).

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Menurut Arsyad (1997), teori Harrod-Domar ini merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Aliran Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, dalam teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap. Teori ini mempunyai beberapa asumsi yaitu:

- a. Perekonomian dalam keadaan *full employment* dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian yang terdiri dari dua sektor yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan.
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan nasional dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output *Capital Output Ratio = COR* dan rasio pertambahan modal-output (*Incremental Capital Output Ratio = ICOR*)

Dalam teori Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari proporsi tertentu lain dari pendapatan nasionalnya jika untuk menggantikan barang-barang modal. Namun, untuk menumbuhkan perekonomian, diperlukan investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika diasumsikan bahwa ada hubungan ekonomi secara langsung antara besarnya stok modal diperlukan

untuk menghasilkan tambahan output total sebesar 1 rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modul-output tersebut.

Hal tersebut bisa dianalogikan, apabila ditetapkan bahwa $COR = k$, rasio kecenderungan menabung (MPS) = s yang merupakan proporsi tetap dari output total, dan investasi diproksikan oleh tingkat tabungan, akhirnya dapat diperoleh model ekonomi yang sederhana sebagai berikut:

- a. Tabungan (S) adalah bagian dalam jumlah tertentu dari s , dari pendapatan nasional (Y). sehingga hubungan kedua hal tersebut adalah sebagai berikut apabila ditulis dalam bentuk persamaan:

$$S = sY \quad (2.1)$$

- b. Investasi neto (I) ditetapkan menjadi perubahan stok modal (ΔK) yang dapat mewakili oleh ΔK , sehingga diperoleh:

$$I = \Delta K \quad (2.2)$$

Namun, dikarenakan jumlah stok modal K berhubungan langsung dengan total pendapatan nasional atau output nasional Y , maka:

$$\frac{k}{y} = y$$

atau

$$\frac{\Delta k}{\Delta y} = k$$

atau, akhirnya

$$\Delta k = k\Delta y \quad (2.3)$$

- c. Dikarenakan tabungan nasional netto (S) harus sama dengan investasi netto (I) maka dapat ditulis menjadi persamaan berikut ini:

$$S = I \quad (2.4)$$

Dari persamaan (2.1) diketahui bahwa $S = sY$, kemudia dari persamaan (2.2) dan (2.3) diketahui bahwa:

$$I = \Delta k = k\Delta y$$

Sehingga dapat ditulis dengan identitas tabungan sama dengan investasi dalam persamaan (2.4) sebagai berikut:

$$S = sY = k\Delta Y = \Delta K = I \quad (2.5)$$

dapat disederhanakan menjadi:

$$sY = c\Delta Y \quad (2.6)$$

Dengan membagi kedua sisi persamaan (2.6) pertama dengan Y dan kemudian dengan K , sehingga diperoleh:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k} \quad (2.7)$$

Sisi kiri persamaan (2.7), atau $\frac{\Delta Y}{Y}$, sebenarnya merupakan tingkat perubahan atau tingkat pertumbuhan GDP (angka presentase perubahan GDP). Persamaan (2.7) adalah model sederhana dari persamaan dalam teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan GDP ($(\Delta Y/Y)$) ditentukan secara bersama – sama oleh rasio tabungan nasional, s , serta rasio modal-output nasional, k . Secara rinci, persamaan itu menyatakan bahwa tanpa adanya campur tangan pemerintah, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan langsung atau secara positif berbanding lurus dengan rasio tabungan (semakin banyak bagian GDP yang dihasilkan) dan secara negatif atau berbanding terbalik terhadap rasio terhadap rasio modal-output pada suatu perekonomian (semakin besar rasio modal-output atau k , maka semakin rendah pula tingkat pertumbuhan GDP).

Secara sederhana dalam logika ekonomi yang digunakan dalam persamaan (2.7) adalah suatu perekonomian dapat tumbuh dengan pesat apabila suatu pemerintahan atau perekonomian tersebut menabung dan atau menginvestasikan sebagian dari GDP-nya. Laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin cepat apabila semakin banyak bagian dari GDP yang ditabung atau diinvestasikan. Akan tetapi tingkat pertumbuhan secara aktual yang dapat dijangkau pada setiap tingkat tabungan dan investasi, banyaknya tambahan output yang didapat dari satu tambahan unit investasi dapat diukur dengan kebalikan rasio modal-output k . Karena kebalikannya, $1/k$ adalah rasio modal-output atau rasio output investasi. Kemudian, dengan mengalikan tingkat investasi baru $s = I/Y$, dengan tingkat produktivitasnya $1/k$, akan didapat tingkat pertumbuhan yang dapat meningkatkan pertumbuhan nasional atau GDP (Todaro, 2006).

2.1.3 Teori Pertumbuhan Solow-Swan

Dalam Todaro (2000) Teori pertumbuhan Solow - Swan, menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah adanya unsure kemajuan teknologi dalam model tersebut. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara capital (K) dan tenaga kerja (L), tapi syarat adanya pertumbuhan ekonomi dalam model Solow-Swan kurang restriktif, ini dikarenakan adanya kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini dapat dikatakan ada fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja.

Teori Solow-Swan melihat bahwa mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga tidak banyak diperlukan adanya campur tangan pemerintah dalam mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiscal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu, akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi dapat dilihat dari kemampuan meningkatkan *skill* atau kemajuan teknik, sehingga produktivitas capital dapat meningkat.

Teori Neo-Klasik menganjurkan agar perekonomian diarahkan menuju pasar sempurna. Karena dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian dapat tumbuh maksimal. Paham neo-klasik juga beranggapan bahwa untuk dapat mencapai suatu pertumbuhan yang mantap (*steady growth*), perlu adanya tingkat saving yang tinggi dan semua keuntungan pengusaha harus diinvestasikan kembali.

2.1.4 Tahapan Pertumbuhan Ekonomi Rostow

Menurut Rostow dalam Arsyad (1997), menjelaskan bahwa sebuah Negara dapat bergerak melalui tahapan berurutan dalam upaya untuk mencapai kemajuan. Seperti yang dikemukakan Rostow dalam bukunya *The Stages of Economic Growth*. Menurut Rostow proses pembangunan ekonomi terjadi dalam 5 tahap yaitu, masyarakat tradisional (*traditional society*), prasyarat untuk tinggal landas

(*the pracondtions of take off*), tinggal landas (*the take-off*), menuju kedewasaan (*the drive to maturirty*), dan masyarakat konsumsi tingkat tinggi (*high mass consumption*). Kelima tahapan tersebut didasarkan pada karakteristik perubahan keadaan ekonomi, social, politik yang terjadi. Rostow beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang multidimensional dimana pembangunan bukan hanya pada perubahan struktur yang terjadi pada sektor pertanian dan meningkatnya sektor industri saja, akan tetapi pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan:

- a. Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik dan social yang pada mulanya berorientasi pada suatu daerah menjadi berorientasi keluar
- b. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi sebuah keluarga kecil.
- c. Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif
- d. Perubahan sikap hidup dan adat istiadat kurang merangsang pembangunan ekonomi.

Rostow dalam Todaro (2000), mengemukakan bahwa setiap upaya untuk tinggal landas mengharuskan akan adanya mobilisasi dana tabungan dalam dan luar negeri yang bertujuan untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sehingga kesempatan kerja meningkat, dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi atas meningkatnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat.

2.2 Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2000), investasi adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Investasi ini memiliki 3 (tiga) peran : 1) merupakan salah satu pengeluaran agregat, dimana peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. 2) Pertambahan barang modal

sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi di masa depan dan perkembangan ini menstimulir pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja. 3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, sehingga akan memberikan kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat. Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh penanam modal (investor) yang menyangkut penggunaan sumber-sumber seperti peralatan, gedung, peralatan produksi, dan mesin-mesin baru lainnya atau persediaan yang diharapkan akan memberikan keuntungan dari investasi (Samuelson dan Nordhaus, 1993).

Dalam ekonomi makro, investasi diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh alat-alat kapital baru. Dengan demikian, investasi total yang terjadi di suatu perekonomian sebagian berupa pembelian alat kapital baru untuk menggantikan alat kapital yang tidak ekonomis untuk dipakai lagi dan sebagian lain berupa pembelian alat-alat kapital yang baru untuk memperbesar stok kapital. Di sisi lain investasi diartikan sebagai pengeluaran dari sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang atau jasa untuk menambah stok barang dan perluasan perusahaan. (Febriananda, 2011)

2.2.1 Faktor Yang Mempengaruhi Investasi

Menurut Sukirno (2000), ada beberapa faktor yang mampu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya suatu investasi, beberapa faktor tersebut, yaitu:

a. Suku Bunga

Suku bunga dapat dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Suatu rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan apabila suku bunga tinggi karena lebih banyak pendapatan dari penabung akan diperoleh. Pada suku bunga rendah orang tidak begitu suka membuat tabungan karena mereka merasa lebih baik melakukan pengeluaran konsumsi atau berinvestasi daripada menabung. Dengan demikian apabila suku bunga rendah masyarakat cenderung menambah pengeluaran konsumsinya atau pengeluaran untuk berinvestasi.

b. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali apabila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari barang-barang lainnya. Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat

investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Disamping itu menurut Greene dan Pillanueva (1991), tingkat inflasi yang tinggi sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro.

c. Tenaga Kerja

Sumber daya manusia (SDM) memiliki dua pengertian yang berbeda, pertama, sumber daya manusia berarti usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja. Secara sederhana tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang termasuk dalam usia kerja.

d. Nilai Tukar (*Kurs*)

Nilai tukar atau kurs merupakan harga mata uang satu negara terhadap harga mata uang negara lain. Nilai tukar mata uang dapat didefinisikan sebagai harga relatif dari mata uang terhadap mata uang Negara lainnya. Pergerakan nilai tukar di pasar dapat dipengaruhi oleh faktor fundamental dan non fundamental. Dalam jangka pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada absorpsi domestik atau yang dikenal dengan *expenditure reducing effect*. Karena penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai riil aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat harga-harga secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Selain itu, Penurunan nilai tukar mata uang domestik

akan menaikkan produk-produk impor yang diukur dengan mata uang domestik dan dengan demikian akan meningkatkan harga barang-barang yang diperdagangkan / barang-barang ekspor (*traded goods*) relatif terhadap barang-barang yang tidak diperdagangkan (*non traded goods*), sehingga didapatkan kenyataan nilai tukar mata uang domestik akan mendorong ekspansi investasi pada barang-barang perdagangan tersebut.

Dalam jangka panjang, investasi merupakan poin penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi seringkali melibatkan kegiatan produksi di keseluruhan sector ekonomi. Guna memenuhi keperluan tersebut, maka dibangun pabrik-pabrik, perkantoran, alat-alat produksi dan infrastruktur yang pembiayaannya dibiayai baik oleh pengeluaran pemerintah maupun investasi swasta. Ada beberapa persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu negara dalam Todaro (1997):

- a. Akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia;
- b. Perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya;
- c. Kemajuan teknologi.

Menurut Boediono (2013) dalam Puspitasri (2016), investasi adalah pengeluaran sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan untuk perluasan pabrik (usaha). Investasi adalah bentuk dari pengerahan sumber daya yang bertujuan untuk menciptakan ataupun menambah kapasitas suatu produksi atau pendapatan dimasa mendatang. Ada dua tujuan utama dari investasi, yaitu mengganti bagian persediaan yang rusak atau juga sebagai tambahan modal yang sudah tersedia. Investasi secara umum dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:

- a. Investasi yang terdorong (*Included Investment*) dan Investasi Otonom (*Autonomous Investment*)

Investasi yang terdorong adalah investasi yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan baik daerah maupun pusat. Investasi ini diakibatkan adanya penambahan permintaan yang disebabkan oleh bertambahnya pendapatan. Sedangkan investasi otonom adalah investasi yang dilakukan pemerintah yang biayanya sangat besar dan tidak memberikan keuntungan, dimana besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan baik itu daerah atau pusat, tetapi dapat berubah karena adanya faktor diluar pendapatan seperti teknologi, kebijakan pemerintah, harapan masyarakat dan lain sebagainya.

- b. Investasi Publik (*Public Investment*) dan Investasi Swasta (*Private Investment*)

Investasi Publik adalah bentuk investasi yang dilakukan pemerintah baik oleh pusat ataupun daerah yang bertujuan untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh swasta yang menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama.

- c. Investasi Domestik (*Domestic Investment*) dan Investasi Asing (*Foreign Investment*)

Investasi domestik adalah penanaman modal yang bersumber dari dalam negeri, sedangkan investasi asing adalah penanaman modal yang sumber pendanaannya berasal dari asing atau luar negeri.

- d. Investasi Bruto (*Gross Investment*) dan Investasi Netto (*Netto Investment*)

Investasi bruto adalah total keseluruhan investasi yang dilakukan atau diselenggarakan dalam suatu periode waktu. Sedangkan investasi netto adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan.

Korelasi positif antara investasi dan pertumbuhan ekonomi diuraikan secara sederhana dalam model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam teori tersebut dikemukakan, tabungan dan investasi adalah hal penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, teori ini memiliki kelemahan yakni kecendrungan menabung dan ratio penambahan modal-output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang.

Demikian pula proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak konstan, harga selalu berubah dan suku bunga dapat berubah akan mempengaruhi investasi.

Menurut Sukirno (2000), investasi swasta merupakan komponen dari perbelanjaan agregat yang bersifat kurang stabil, dan menjadi sumber penting dalam perekonomian. Besarnya investasi perusahaan dapat dilihat dalam analisis hubungan dengan tingkat bunga. Apabila suku bunga rendah, permintaan akan investasi akan meningkat, begitu juga sebaliknya apabila suku bunga naik akan menyebabkan pengurangan dalam jumlah investasi. Selain itu, dikatakan bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat untuk terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional serta kemakmuran masyarakat.

2.3 Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan struktur anggaran daerah, elemen-elemen yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari :

a. Belanja Aparatur

Bagian belanja berupa belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

b. Belanja Pelayanan Publik

Bagian belanja berupa belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

c. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ini dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu jenis belanja yaitu hibah, subsidi, bantuan sosial, dan transfer.

d. Belanja tidak terduga

Pengeluaran pemerintah yang disediakan untuk :

- 1) Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.
- 2) Utang (pinjaman) periode sebelumnya yang belum diselesaikan dan atau yang tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan.

Keynes dalam Dumairy (1996) berpendapat bahwa, pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) merupakan salah satu unsur dari permintaan agregat. Konsep perhitungan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y = C + I + G + (X - M)$. Persamaan ini diketahui sebagai gambaran pendapatan nasional, dimana variabel Y melambangkan pendapatan nasional yang sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan variabel G dan Y dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dalam menentukan pendapatan nasional.

Selain itu Keynes dalam Bacin (2009), berpendapat tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh perbelanjaan agregat. Pada umumnya perbelanjaan agregat dalam suatu periode tertentu adalah kurang dari perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat *full employment*. Keadaan ini disebabkan karena investasi yang dilakukan para pengusaha biasanya lebih rendah dari tabungan yang akan dilakukan dalam perekonomian *full employment*. Keynes berpendapat sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan menciptakan *full employment*. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah.

Dumairy (1996) menyebutkan bahwa pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu

bukan saja untuk menjalankan roda pemerintah sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis, melainkan dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi. Pemerintah juga harus memperjuangkan pemerataan melalui program perpajakan dan redistribusi pendapatan untuk kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan, pembelanjaan dan peraturan moneter untuk menggapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi laju inflasi dan pengangguran serta memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan APBD untuk daerah/regional (Sukirno, 2000).

2.3.1 Teori Pengeluaran Pemerintah Rostow dan Musgrave

Teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave dalam Dumaury (1996) dan Mangkusoebroto (1997) merupakan suatu pandangan yang didasarkan pada pengamatan-pengamatan di banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Secara umum Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tiga buah tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal pengeluaran pemerintah untuk investasi merupakan bagian yang terbesar dari total investasi yang ada. Pengeluaran investasi tersebut ditujukan untuk pengadaan sarana maupun prasarana publik seperti infrastruktur transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Pada tahap menengah investasi dari swasta mulai berkembang tetapi pemerintah masih tetap memegang peranan besar guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas.

Selain harus mengatasi kegagalan pasar yang terjadi, pemerintah juga harus menyediakan barang publik dalam jumlah yang lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik. Perkembangan ekonomi pada tahap ini menyebabkan hubungan

antar sektor yang semakin kompleks. Rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tetapi rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional akan semakin mengecil. Pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan sarana prasarana ke pengeluaran untuk kesejahteraan sosial masyarakat seperti program kesehatan, jaminan hari tua dan lain sebagainya. Pada intinya, teori Rostow dan Musgrave ini membagi pembangunan ekonomi ke dalam beberapa tahapan. Keterlibatan dan peran pemerintah semakin lama semakin berkurang seiring dengan semakin meningkatnya tahapan yang dilalui. (Dumairy, 1996)

2.3.2 Teori Adolf Wagner

Dalam Dumairy (1996), teori pengamatan empiris oleh Adolf Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap PDB dengan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB.

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Hukum tersebut dapat dijelaskan dengan rumus berikut:

$$\frac{GpC_t}{YpC_t} \geq \frac{GpC_{t-1}}{YpC_{t-1}} \geq \frac{GpC_{t-2}}{YpC_{t-2}} \dots \dots > \frac{GpC_{t-n}}{YpC_{t-n}}$$

Dimana:

GpC : Pengeluaran Pemerintah Perkapita

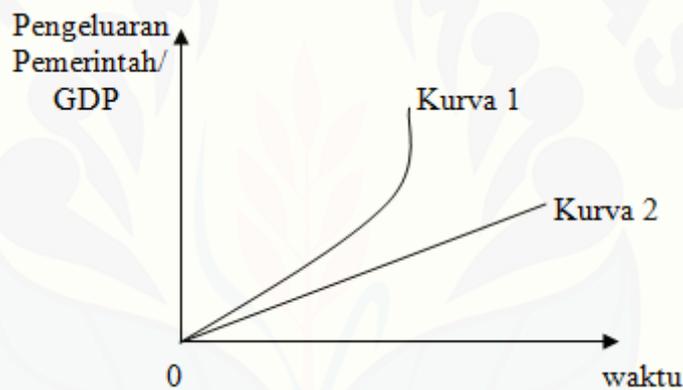
YpC : Produk atau Pendapatan Nasional per Kapita

t : Indeks Waktu

Hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Sehingga Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian akan menyebabkan hubungan antara industri dengan industri dan

hubungan industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks. Sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif semakin besar. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah ada 5 hal yaitu:

- a. Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan,
- b. Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat,
- c. Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi,
- d. Perkembangan ekonomi,
- e. Perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.



Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner (Sumber: Mangkoesoebroto, 1997)

Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. Maksudnya, pengeluaran pemerintah akan semakin meningkat seiring bertambahnya waktu. Dalam teori ini, Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

2.3.3 Teori Peacock dan Wiseman

Dalam Dumairy (1996), Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis

penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar.

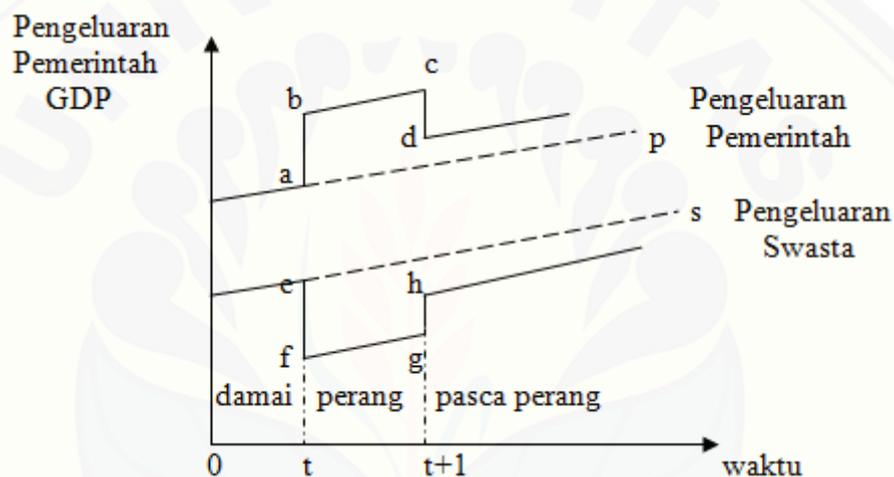
Peacock dan Wiseman mendasarkan teorinya pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Menurut Peacock dan Wiseman pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. (Dumairy, 1996)

Dalam keadaan normal, kenaikan PDB akan berdampak baik pada penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal terganggu, suatu contoh yaitu karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk berinvestasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. (Iddris, 2016)

Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya

gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*). (Iddris, 2016)

Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi seperti tangga. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

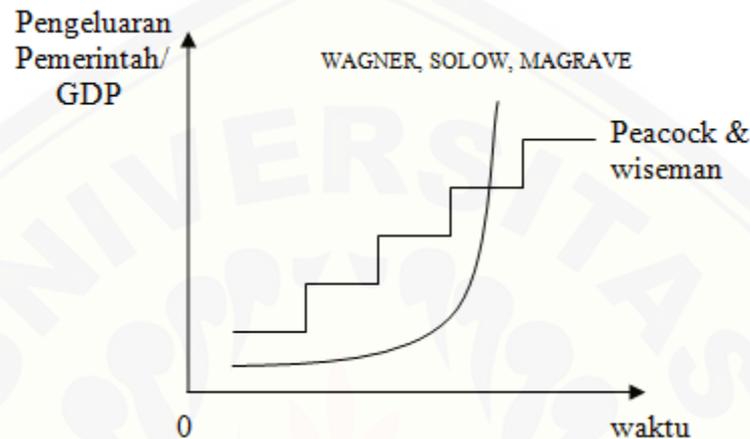


Gambar 2.2 Kurva Teori Peacock dan Wiseman.
(Sumber: Mangkoesobroto, 1997)

Dalam keadaan normal, t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AP. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AB dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen BC. Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke P. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Kenaikan tarif pajak tersebut dimaklumi oleh masyarakat sehingga tingkat toleransi pajak meningkat dan pemerintah dapat memungut pajak yang lebih besar tanpa menimbulkan gangguan dalam masyarakat. Secara grafik, perkembangan

pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman bukanlah berpola seperti kurva mulus berslope positif sebagaimana tersirat dalam pendapat Rostow dan Musgrave. Melainkan berslope positif dengan bentuk patah-patah seperti tangga yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Pendapat (Sumber: Mangkoesobroto, 1997)

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Raharjo (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Semarang Tahun 1982-2003”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi swasta, dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian tersebut, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah (rutin) dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah α 10 % akan tetapi variabel pengeluaran pemerintah (pembangunan) dan angkatan kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan

Bancin (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dan Investasi Swasta Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Periode 1978-2007”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pembangunan dan investasi swasta terhadap pendapatan

regional. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengeluaran pembangunan dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan regional.

Rustiono (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah”. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian tersebut adalah angkatan kerja, investasi swasta (PMA dan PMDN) dan belanja pemerintah daerah memberi dampak positif terhadap perkembangan PDRB Propinsi Jawa Tengah.

Puspitasari (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Investasi Publik, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Regional di Provinsi Jawa Timur”. bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi publik, investasi swasta dan tenaga kerja terhadap pendapatan regional di Provinsi Jawa Timur. Alat analisis yang digunakan adalah *Ordinary Leas Square* dengan data panel.

Naufal (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Eks Karesidenan Besuki Tahun 2004-2012” bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan tenaga kerja terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel pengeluaran pemerintah (prob. 0,0000) dan variabel investasi swasta (prob. 0,0065) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya variabel tenaga kerja (prob .0,1074) berpengaruh positif namun tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dengan tingkat R² sebesar 0,992219 atau 99,22 persen variabel dependent mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Besuki.

Suryanto (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Subosukawonosraten Tahun 2004 – 2008”. Bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan

pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Subosukawonosraten. Hasil dari penelitian ini bahwa variabel tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Subosukawonosraten.

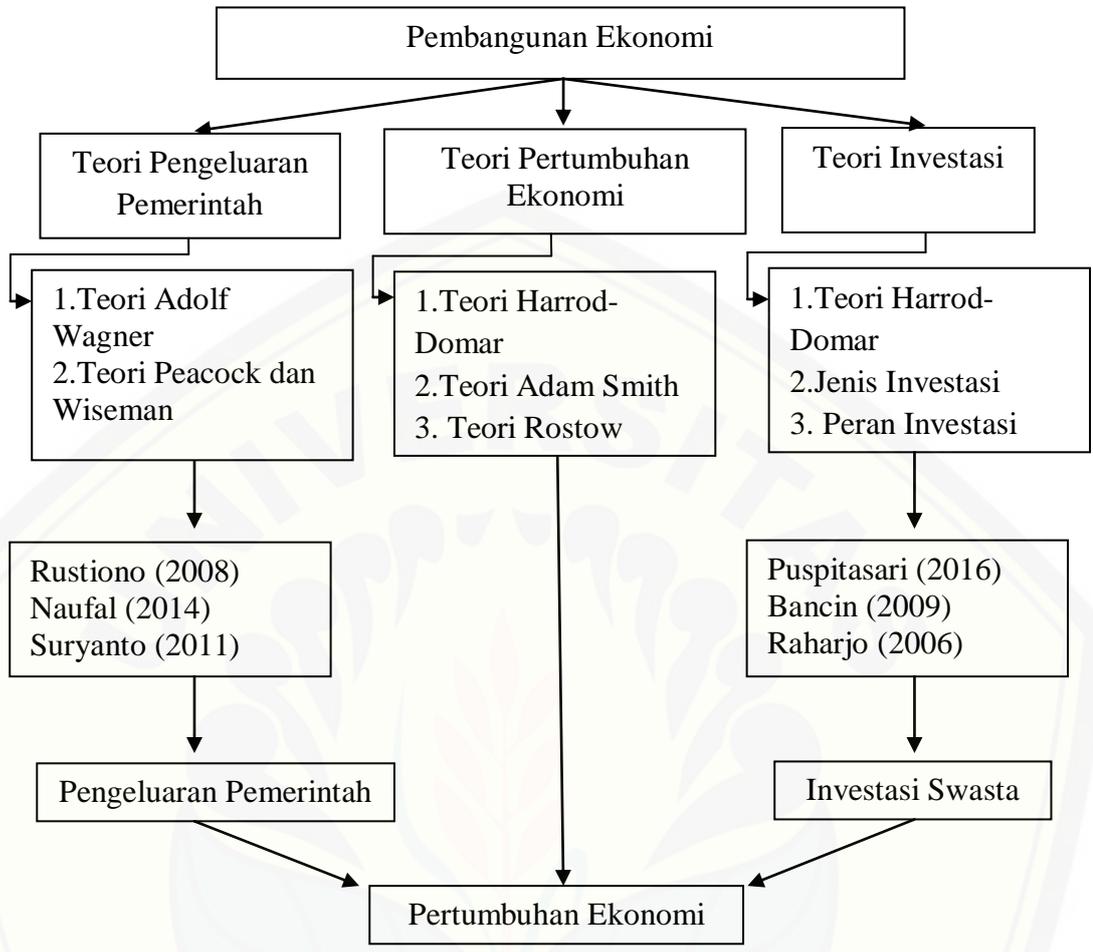
Sularno (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki t hitung sebesar 6,045 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000, dimana nilai sig dibawah 0.05, sehingga variabel PDRB berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal dan memiliki koefisien positif 2,963. Variabel PAD memiliki t hitung sebesar 2,996 dengan nilai signifikansi sebesar 0.003 sehingga berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal dan memiliki koefisien positif sebesar 0,399. Variabel DAU memiliki t hitung sebesar 1,936 dengan nilai signifikansi 0.055, sehingga variabel DAU tidak berpengaruh positif secara parsial terhadap belanja modal dan memiliki koefisien positif 0,057. Dan nilai F hitungnya sebesar 75,169 dengan tingkat signifikansi 0.000, sehingga variabel PDRB, PAD, DAU berpengaruh secara simultan terhadap pengalokasian Belanja Modal.

Sodik (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi regional (26 provinsi) di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi regional dipengaruhi pengeluaran pemerintah (*IP*), konsumsi pemerintah (*KP*), jumlah angkatan kerja (*L*) dan tingkat keterbukaan ekonomi daerah/provinsi (*X-M*), namun investasi secara individu tidak berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu terletak pada metode analisis yang digunakan. Penelitian ini dengan sebelumnya sama sama menggunakan metode analisis data panel yaitu gabungan data *time series* dan data *cross section*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel pengeluaran pemerintah yang pada penelitian sebelumnya menggunakan data belanja pemerintah secara total, namun pada penelitian ini diprosikan dari nilai belanja modal. Selain itu, kelebihan dari penelitian ini adalah data yang digunakan adalah data belanja modal. Hal ini dikarenakan penelitian ini bisa lebih terfokus pada proksi belanja modal yang pada umumnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Diharapkan nantinya mampu diperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan, keterbatasan dari penelitian ini yaitu pada terbatasnya periode waktu penelitian serta terbatasnya data. Serta, model yang dikembangkan dalam penelitian ini masih terbatas karena hanya melihat pengaruh dari variabel pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan.

2.6 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berpedoman pada laju pertumbuhan pendapatan regional di Jawa Timur dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan tingkat partisipasi angkatan kerja.. Penelitian ini mengacu pada teori Rostow yang menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, salah satu strategi utama untuk tinggal landas adalah pengerahan dana tabungan masyarakat. Dengan meningkatnya investasi, maka lapangan pekerjaan akan tercipta dengan sendiri, sehingga dari investasi tersebut dapat menyerap tenaga kerja baru yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nantinya. Selain itu, Sollow-Swan bahwa tenaga kerja adalah salah satu factor utama dalam penentu pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2.4 Kerangka Konseptual

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *eksplanatory*, merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel peneliti dengan pengujian hipotesa (Singarimbun dan Effendi, 1995).

3.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan nilai pengeluaran pemerintah, investasi swasta sebagai variabel independen untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 dengan mengambil data tahun 2012-2015. Jawa Timur dipilih sebagai provinsi yang diteliti, karena termasuk Provinsi yang rata-rata pertumbuhannya tertinggi se-Provinsi di Pulau Jawa dalam kurun waktu 2012-2015.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara tanpa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun rapi dalam arsip yang dipublikasikan. Data dalam penelitian ini adalah data panel yang terdiri atas penggabungan dari data deret berkala (*time series*) dari tahun 2012 – 2015 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 38 data yang mewakili 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, sehingga menghasilkan 152 observasi. Menurut Widarjono (2005), data panel adalah gabungan data *time series* dan data *cross section*.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Jawa

Timur dan DPJKP Kementerian Keuangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah:

- a. Data pertumbuhan ekonomi yang diukur dari nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 dari tahun 2012 – 2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur
- b. Data pengeluaran pemerintah berupa data belanja modal yang didapat dari data APBD Pemerintah pada sisi pengeluaran di setiap kab/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012 - 2015 yang diperoleh dari DPJKP Kementerian Keuangan.
- c. Data investasi swasta yang terdiri atas:
 - 1) Investasi Masyarakat yang diproyeksikan dari Dana Pihak Ketiga yang ada di Bank Komersial di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012 – 2015 yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Investasi Industrial yang diproyeksikan dari data Penanaman Modal Dalam Negeri yang diperoleh dari Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Timur.

3.5 Metode Analisis Data

Metode penelitian ini menggunakan analisis data regresi linier berganda dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dengan menggunakan data panel. Menurut Nachrowi & Usman (2006), metode OLS ini akan memberikan hasil regresi yang baik tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode regresi linier data panel ini digunakan untuk meregresi pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta, terhadap pertumbuhan ekonomi di kab/kota di Provinsi Jawa Timur. Sebagai alat pengolahan data digunakan Eviews 9 dalam penelitian ini.. Data panel dalam penelitian ini adalah kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) dan data deret lintang (*cross section*). Ada beberapa kelebihan apabila menggunakan data panel. Menurut Baltagi dalam Gujarati (2012) menjelaskan beberapa kelebihan data panel diantaranya:

- a. Data yang berhubungan dengan individu, perusahaan, negara bagian, negara dan lain-lain, dari waktu ke waktu terdapat batasan *heterogenitas* dalam unit-

unit tersebut. Teknik estimasi data panel yang heterogen tersebut secara eksplisit dapat diperhitungkan.

- b. Dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section*, data panel dapat memberikan lebih banyak informasi, variasi, dan sedikit kolinearitas antar variabel, serta derajat bebas lebih besar dan lebih efisien.
- c. Data panel lebih cocok untuk mempelajari dinamika perubahan, daripada studi berulang-ulang (*cross section*).
- d. Data panel lebih baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak sederhana yang tidak dapat dilihat pada data *time series* murni atau *cross section* murni.
- e. Data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit. Semisal fenomena keekonomian berskala dan perubahan teknologi yang lebih tepat dipelajari dalam data panel.
- f. Data panel bisa meminimumkan bias yang terjadi apabila ingin mengagregasi individu-individu atau perusahaan-perusahaan ke dalam agregasi besar dengan membuat data menjadi beberapa ribu unit.

Adapun model ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$\text{Pertumbuhan} = f(PP, IS)$$

Model ekonomi tersebut kemudian ditransformasikan kedalam model ekonometrika, sehingga menjadi:

$$G_{it} = \beta_0 + \beta_1 PP_{it} + \beta_2 IS_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

G : Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan nilai PDRB ADHK

PP : Pengeluaran pemerintah

IS : Investasi Swasta

i : *Cross Section*

t : *Time Series*

β_0 : Konstanta

$\beta_{1,2,3}$: Koefisien Regresi (variabel yang diestimasi)

ε : *Error term* (variabel gangguan)

Adanya perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma natural. Alasan pemilihan model logaritma natural adalah sebagai berikut:

- a. Menghindari adanya heterokedastisitas
- b. Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas
- c. Mendekatkan skala data (normalitas data)

Dalam model penelitian ini logaritma yang digunakan adalah dalam bentuk log – linear (*log*). Menurut Benoit (2011) transformasi logaritma merupakan sarana yang mudah untuk mengubah variabel yang tidak normal menjadi mendekati normal. Sehingga persamaan menjadi sebagai berikut:

$$\text{Log } G_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log } PP_{it} + \beta_2 \text{Log } IS_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

Log : log – linear

β_1, β_2 : koefisien

ε : *Error term* (variabel gangguan)

Penggunaan data panel dalam analisis dapat menggunakan dua metode yaitu *Fixed Effect Method* (FEM) dan *Random Effect Method* (REM). Sehingga sebelum melakukan pengestimasi model penelitian, dilakukan terlebih dahulu uji spesifikasi guna menganalisis model FEM atau REM yang akan digunakan. Cara menentukan uji spesifikasi adalah dengan melakukan Uji Chow (*Chow Test*) dan Uji Hausman (*Hausman Test*). Berikut adalah 2 model yang akan diujikan dalam penelitian ini:

- a. *Fixed Effect Method* (FEM)

Metode yang digunakan dalam mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk mengetahui adanya perubahan dalam intersep. Dalam metode ada beberapa asumsi yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Intersep dan koefisien slope adalah tetap antar waktu dan ruang dan *error term* mencakup perbedaan waktu dan individu
- 2) *Slope* adalah tetap tetapi intersep berbeda antar individu

- 3) *Slope* tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun antar individu
- 4) *Intersep* dan *Slope* berbeda antar individu, dan
- 5) *Intersep* dan *Slope* berbeda antar waktu dan antar individu

b. *Random Effect Method* (REM)

Metode ini merupakan metode yang akan mengestimasi data panel dimana residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Teknik yang digunakan dalam metode ini adalah dengan menambah variabel *error* yang mungkin akan muncul dalam hubungan antar waktu dan antar individu. Dalam metode ini lebih dianjurkan menggunakan metode *GLS* (*Generalized Least Square*) guna mendapatkan estimator yang efisien daripada menggunakan *OLS*.

3.6 Uji Penentuan Model

3.6.1 Uji Chow (*Chow Test*)

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model yang terbaik antara *common effect* dengan *fixed effect* digunakan signifikansi Chow. Uji Chow memberikan penilaian dengan menggunakan *chi-square statistic* sehingga keputusan penggunaan model dapat ditentukan dengan benar.

- a. Buat hipotesis Uji Chow: H_0 : *Common Effect* dan H_1 : *Fixed Effect*
- b. Tentukan kriterian pengujian: apabila *Chi-Square* hitung < *Chi-Square* tabel dan probabilitas hitung > $\alpha = 5\%$, maka H_0 diterima, sehingga metode *random effect* lebih tepat digunakan.

Hipotesa dalam Uji Chow adalah sebagai berikut:

H_0 : model mengikuti *Random Effect*

H_1 : model mengikuti *Fixed Effect*

3.6.2 Uji Hausman (*Hausman Test*)

Uji ini digunakan untuk menentukan model apakah yang akan digunakan *fixed effect method* atau *random effect method* yang paling efektif. Uji Hausman memberikan penilaian dengan menggunakan *chi-square statistic* sehingga keputusan penggunaan model dapat ditentukan dengan benar.

Prosuder Uji Hausman adalah sebagai berikut:

- a. Buat hipotesis Uji Hausman: H_0 : *Random Effect* dan H_1 : *Fixed Effect*
- b. Tentukan kriteria pengujian: apabila *Chi-Square* hitung < *Chi-Square* tabel dan probabilitas hitung > $\alpha = 5\%$, maka H_0 diterima, sehingga metode *random effect* lebih tepat digunakan.

Hipotesa dalam Uji Hausman adalah sebagai berikut:

H_0 : model mengikuti *Random Effect*

H_1 : model mengikuti *Fixed Effect*

3.7 Uji Statistik

Pengujian statistic terdiri atas: a. Uji $F_{statistik}$ (uji pengaruh secara simultan), b. Uji $t_{statistik}$ (uji pengaruh secara parsial) dan c. uji R^2 (koefisien determinasi)

3.7.1 Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Uji $F_{statistik}$ dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Dengan rumus sebagai berikut:

$$F_{statistik} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Keterangan:

F = Uji Simultan

R^2 = Koefisien Determinasi

k = Jumlah Variabel Bebas

n = Jumlah Observasi Sampel

k-1= Derajat bebas pembilang

n-k= Derajat bebas penyebut

Hipotesis:

H_0 : $b_1 ; b_2 ; b_3 = 0$, artinya, secara simultan variabel pengeluaran pemerintah dan industri pengolahan tidak berpengaruh terhadap variabel pendapatan regional

H_a : $b_1; b_2; b_3 \neq 0$, artinya, secara simultan variabel pengeluaran pemerintah dan industri pengolahan berpengaruh terhadap variabel pendapatan regional

Kriteria Pengujian:

- Dengan tingkat keyakinan (α) 5%, jika nilai $F_{statistik} > F_{tabel}$ atau nilai probabilitas $F_{statistik} <$ nilai probabilitas α H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, secara simultan variabel independen pengeluaran pemerintah dan industri pengolahan mempengaruhi variabel dependen pendapatan regional.
- Dengan tingkat keyakinan (α) 5%, jika nilai $F_{statistik} < F_{tabel}$ atau nilai probabilitas $F_{statistik} >$ nilai probabilitas α H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, secara simultan variabel independen pengeluaran pemerintah dan industri pengolahan tidak mempengaruhi variabel dependen pendapatan regional.

3.7.2 Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t)

Uji $t_{statistik}$ digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan varians variabel dependen, dengan rumus sebagai berikut:

$$t_{statistik} = \frac{b_i - B_i}{Sb_i}$$

Hipotesis:

H_0 : $b_1; b_2; b_3 = 0$ artinya, secara parsial variabel pengeluaran pemerintah atau industri pengolahan tidak berpengaruh terhadap variabel pendapatan regional.

H_a : $b_1; b_2; b_3 \neq 0$ artinya, secara parsial variabel pengeluaran pemerintah atau industri pengolahan berpengaruh terhadap variabel pendapatan regional.

Kriteria pengujian:

- Dengan tingkat keyakinan (α) 5%, jika nilai $t_{statistik} > t_{tabel}$ atau nilai probabilitas $t_{statistik} <$ nilai probabilitas α H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, secara simultan variabel independen pengeluaran pemerintah dan industri pengolahan mempengaruhi variabel dependen pendapatan regional.
- Dengan tingkat keyakinan (α) 5%, jika nilai $t_{statistik} < t_{tabel}$ atau nilai probabilitas $t_{statistik} >$ nilai probabilitas α H_0 ditolak dan H_a diterima.

Artinya, secara simultan variabel independen pengeluaran pemerintah dan industri pengolahan tidak mempengaruhi variabel dependen pendapatan regional.

3.7.3 Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu dengan menghitung koefisien R^2 . Koefisien determinasi merupakan angka yang memberikan proporsi atau presentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X). (Gujarati, 2004)

Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{\Sigma(\hat{Y}^1 - \hat{Y})^2}{\Sigma(Y^1 - \hat{Y})^2}$$

Nilai R^2 yang sempurna adalah satu (1), yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variasi independen yang dimasukkan ke dalam model. Dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulannya adalah:

- Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol (0), berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat lemah.
- Nilai R^2 mendekati satu (1), berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.8 Uji Asumsi Klasik

Hasil analisis regresi dengan metode Ordinary Least Square yang signifikan sudah dapat menentukan bahwa model regresi yang diperoleh telah dapat menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Untuk memperjelas dan memperkuat hasil analisis, maka dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik perlu dilakukan, hal ini dikarenakan dalam model regresi yang dilakukan harus memperhatikan penyimpangan atas asumsi klasik, karena apabila asumsi klasik tidak terpenuhi maka variabel-variabel penjelas akan menjadi tidak efisien.

Uji asumsi klasik terdiri atas berbagai uji – uji lainnya, yaitu:

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang terdistribusi normal atau mendekati normal adalah model regresi yang baik (Ghozali, 2014). Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidak gangguan (μ) antara lain J-B test dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode J-B test yang akan dilakukan dengan menghitung skewness dan kurtosis. Model untuk uji normalitas adalah sebagai berikut:

$$J-B \text{ hitung} = [S^2/6 + (\frac{k-3}{24})]$$

dimana:

S = *Skewness Statistic*

K = *Kurtois*

Dalam uji normalitas ada beberapa kriteria pengujian, yakni sebagai berikut:

- a. Nilai $JB_{hitung} >$ nilai X^2_{tabel} atau nilai $JB_{hitung} <$ nilai probabilitas ($\alpha=5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual *error term* terdistribusi normal ditolak;
- b. Nilai $JB_{hitung} <$ nilai X^2_{tabel} atau nilai $JB_{hitung} >$ nilai probabilitas ($\alpha=5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual *error term* terdistribusi normal diterima;

3.8.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel bebas. Dalam hal ini, variabel bebas tidak bersifat ortogonal. Variabel bebas yang bersifat ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasinya sama dengan nol. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara melihat R^2 dari *auxiliary regression* yaitu dengan nilai R^2 model utama dengan regresi dari masing-masing variabel bebasnya. Jika nilai R^2 parsial dari tiap variabel bebas $>$ dari R^2 model utama, maka terjadi multikolinearitas dalam regresi tersebut. Selain itu bisa juga dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor* (VIF), apabila nilai VIF $>$ dari 10 maka data yang diteliti memiliki multikolinearitas, apabila nilai VIF $<$ dari 10 maka data yang diteliti tidak memiliki multikolinearitas.

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan *variansi* dalam semua pengamatan. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah apabila terdapat kesamaan *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap (*homoskedastisitas*). Untuk mendeteksinya bisa digunakan Uji White dengan membandingkan nilai probabilitas dan tingkat *alpha*. Dalam uji ini, apabila nilai probabilitas observasi $R^2 >$ dari nilai $\alpha = 5\%$ maka tidak ada heteroskedastisitas. Namun, sebaliknya bila nilai probabilitas observasi $R^2 < \alpha = 5\%$ maka ada heteroskedastisitas.

3.9 Definisi Variabel Operasional

Variabel operasional adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini agar terhindar dari terjadinya pemahaman yang kurang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka berikut adalah definisi dan pengukuran dari variabel operasional tersebut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

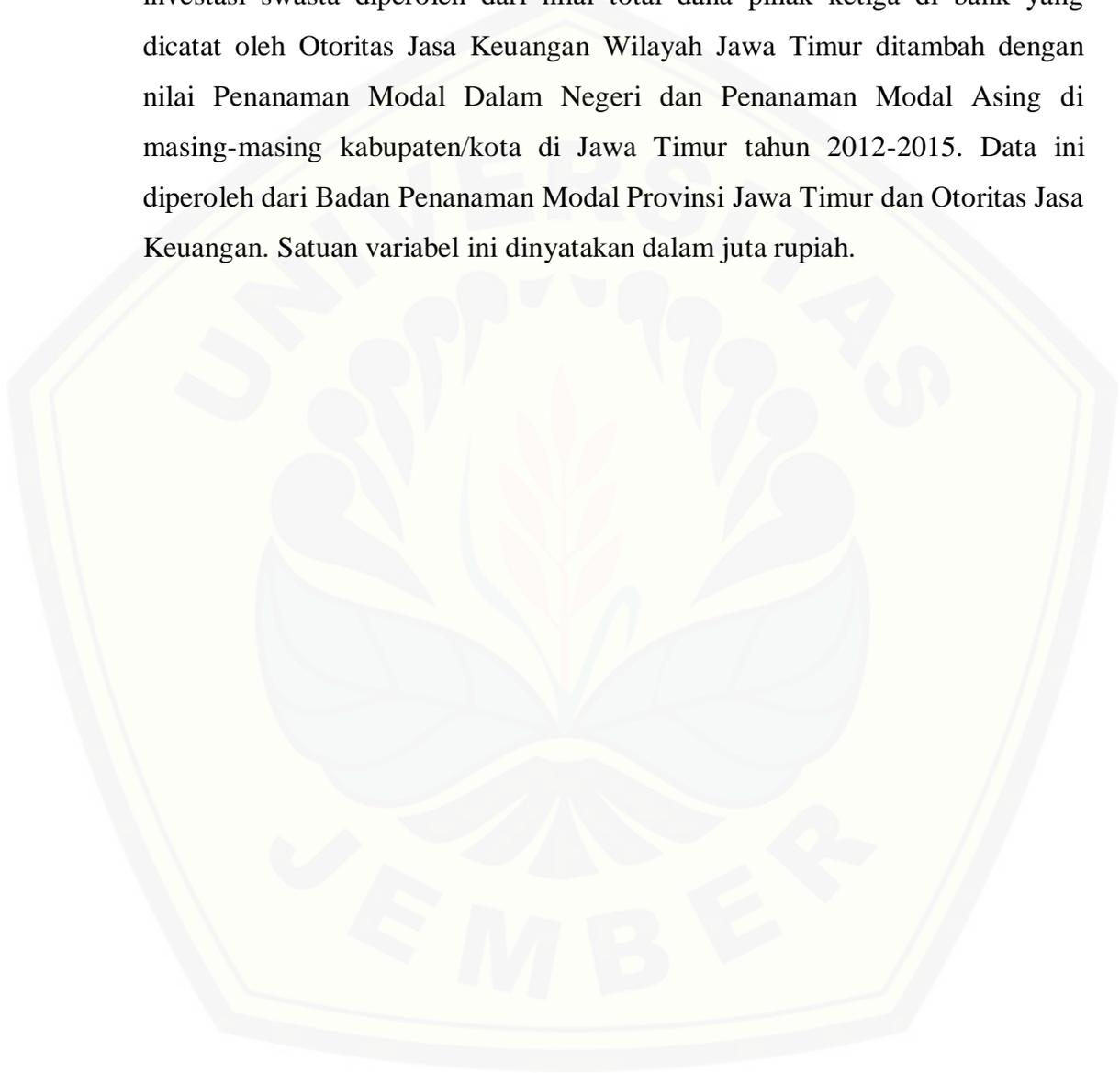
Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu pertumbuhan yang menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dapat diketahui melalui nilai PDRB dalam hal ini adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dari tahun 2012-2015(BPS Jatim, 2016). Satuan dari variabel ini dinyatakan dalam juta rupiah.

b. Pengeluaran pemerintah`

Pengeluaran pemerintah adalah pengalokasian dana yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang secara langsung ataupun tidak langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Data pengeluaran pemerintah ini diperoleh dari jumlah pengeluaran pemerintah berupa belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tiap kabupaten/kota di Jawa Timur dalam kurun waktu 2012-2015. Data ini diperoleh langsung dari DPJKP Kementrian Keuangan. Satuan variabel ini dinyatakan dalam juta rupiah

c. Investasi Swasta

Investasi Swasta adalah investasi yang dilakukan oleh pihak swasta (non pemerintah), dimana keuntungan adalah tujuan utama dari investasi tersebut, tetapi berdampak tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Data investasi swasta diperoleh dari nilai total dana pihak ketiga di bank yang dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Jawa Timur ditambah dengan nilai Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2012-2015. Data ini diperoleh dari Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dan Otoritas Jasa Keuangan. Satuan variabel ini dinyatakan dalam juta rupiah.



BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Keadaan Geografis Wilayah Jawa Timur



Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Timur

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Kabupaten (Regency)

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 01. Pacitan | 11. Bondowoso |
| 02. Ponorogo | 12. Situbondo |
| 03. Trenggalek | 13. Probolinggo |
| 04. Tulungagung | 14. Pasuruan |
| 05. Blitar | 15. Sidoarjo |
| 06. Kediri | 16. Mojokerto |
| 07. Malang | 17. Jombang |
| 08. Lumajang | 18. Nganjuk |
| 09. Jember | 19. Madiun |
| 10. Banyuwangi | 20. Magetan |

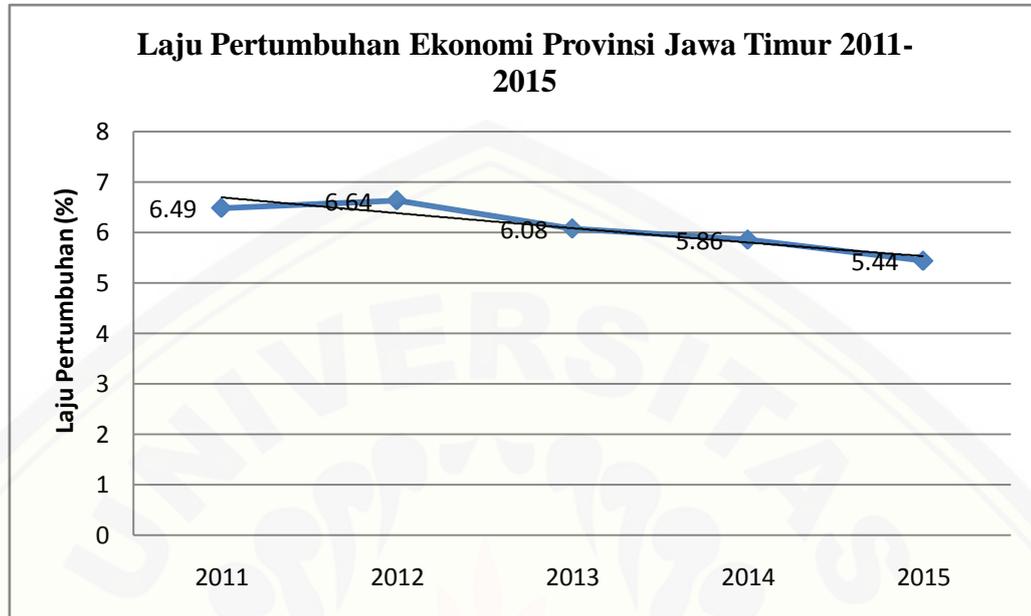
Kota (Municipality)

- | |
|---------------------|
| 1. Kota Kediri |
| 2. Kota Blitar |
| 3. Kota Malang |
| 4. Kota Probolinggo |
| 5. Kota pasuruan |
| 6. Kota Mojokerto |
| 7. Kota Madiun |
| 8. Kota Surabaya |
| 9. Kota Batu |

Provinsi Jawa Timur adalah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa selain Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Jawa Timur terletak pada 111,0⁰ hingga 114,4⁰ Bujur Timur dan 7,12⁰ hingga 8,48⁰ Lintang Selatan. Lokasi Provinsi Jawa Timur berada disekitar garis khatulistiwa, sehingga seperti provinsi lainnya di Indonesia, wilayah ini mempunyai perubahan musim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 47.799,75 km² yang terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota, 29 Kabupaten dan 9 Kota. Selain itu, wilayah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu Jawa Timur daratan dan wilayah kepulauan Madura. Luas wilayah Jawa Timur mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur, sedangkan luas wilayah kepulauan Madura hanya sekitar 10%. Wilayah Provinsi Jawa Timur sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Di sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bali. Di sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka yaitu Samudera Hindia. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. (BPS Jawa Timur, 2016).

4.1.2 Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan bagaimana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Bertambahnya pendapatan masyarakat, diharapkan kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Tercapainya kesejahteraan masyarakat ini merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Keberhasilan ini biasanya dapat dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. Berikut adalah data laju pertumbuhan ekonomi di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2011-2015.



Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2015
(Sumber: *BPS Jawa Timur (diolah)*)

Pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan selama kurun waktu pengamatan. Terlihat bahwa rata rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,26%. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi jawa timur mengalami kenaikan sebesar 0,15%. Namun, pada tahun selanjutnya pada tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan paling besar yaitu sebesar -0,56% dan pada tahun 2014 sebesar -0,22% hingga pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -0,42%. Hal ini berarti bahwa, perekonomian di Jawa Timur sedang mengalami resesi. Walaupun pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur masih tergolong tertinggi di Pulau Jawa seperti dijelaskan sebelumnya, namun laju pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan atau minus (-).

4.2 Gambaran Umum Variabel

4.2.1 Gambaran Umum Variabel Dependent Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur

Tabel 4.1 Data Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015 (dalam persen)

Kabupaten/ Kota	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Bangkalan	-1.42	0.19	7.19	-2.66
Banyuwangi	7.24	6.71	5.72	6.01
Blitar	5.62	5.06	5.02	5.05
Bojonegoro	3.77	2.37	2.29	17.42
Bondowoso	6.09	5.81	5.05	4.95
Gresik	6.92	6.05	7.04	6.58
Jember	5.83	6.06	6.21	5.36
Jombang	6.15	5.93	5.42	5.35
Kediri	6.11	5.82	5.32	4.88
Lamongan	6.92	6.93	6.30	5.77
Lumajang	6.00	5.58	5.32	4.62
Madiun	6.12	5.67	5.34	5.26
Magetan	5.79	5.85	5.10	5.17
Malang	6.77	5.30	6.01	5.27
Mojokerto	7.26	6.56	6.45	5.65
Nganjuk	5.85	5.40	5.10	5.18
Ngawi	6.63	5.50	5.82	5.08
Pacitan	6.33	5.87	5.20	5.10
Pamekasan	6.25	6.10	5.62	5.32
Pasuruan	7.50	6.95	6.74	5.38
Ponorogo	5.98	5.14	5.21	5.25
Probolinggo	6.44	5.15	4.90	4.76
Sampang	5.77	6.53	0.08	2.08
Sidoarjo	7.26	6.89	6.44	5.24
Situbondo	5.43	6.19	5.79	4.86
Sumenep	9.96	14.45	6.23	1.27
Trenggalek	6.22	6.00	5.28	5.03
Tuban	6.29	5.85	5.47	4.89
Tulungagung	6.47	6.13	5.46	4.99
Kota Batu	7.26	7.29	6.90	6.69
Kota Blitar	6.52	6.49	5.88	5.68
Kota Kediri	5.27	3.52	5.85	5.36
Kota Madiun	6.83	7.68	6.62	6.15
Kota Malang	6.26	6.20	5.80	5.61
Kota Mojokerto	6.09	6.20	5.83	5.74
Kota Pasuruan	6.31	6.51	5.71	5.52
Kota Probolinggo	6.49	6.47	5.93	5.86
Kota Surabaya	7.35	7.58	6.96	5.97
Jawa Timur	6.64	6.08	5.86	5.44

Sumber: Lampiran A (diolah)

PDRB adalah nilai total keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah. Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa PDRB Provinsi Jawa

Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan atau pertumbuhan. Dalam tahun penelitian 2012-2015, pada tahun 2012 Produk Domestik Regional Bruto senilai 1,124,464,600 (Juta Rupiah). Pada tahun 2013 pertumbuhan PDRB meningkat sebesar 68,325,200 (Juta Rupiah) menjadi nilai 1,192,789,800 (Juta Rupiah). Selanjutnya, pada tahun 2014 pertumbuhan PDRB-nya meningkat sebesar 69,894,700 (Juta Rupiah) menjadi 1,262,684.5 (Juta Rupiah). Hingga pada tahun 2015 meningkat sebesar 68,710,500 (Juta Rupiah) menjadi 1,331,395 Juta Rupiah. Meskipun perekonomian di Jawa Timur dari tahun 2012-2015 mengalami pertumbuhan, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan. Seperti pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur turun sebesar 0,6%. Kemudian pada tahun 2014 sebesar 0,2% dan pada tahun 2015 sebesar 0,4%. Penurunan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu isu politik yang melanda Indonesia dan khususnya Jawa Timur dalam kurun waktu 2013-2015 serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang dialami Indonesia pada tahun 2014 dan berdampak pada perekonomian Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.2 Kabupaten/Kota dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto tertinggi dan terendah tahun 2014 dan 2015

Kabupaten/ Kota	Tahun		Pertumbuhan
	2014	2015	
Kota Surabaya	305,947,600	324,215,200	5.97%
Sidoarjo	106,434,300	112,012,900	5.24%
Pasuruan	80,105,400	84,415,700	5.38%
Kota Pasuruan	4,561,300	4,813,300	5.52%
Kota Mojokerto	3,774,600	3,991,400	5.74%
Kota Blitar	3,649,600	3,856,900	5.68%

Sumber: *Lampiran A (diolah)*

Bedasarkan Tabel 4.2 Kota Surabaya adalah daerah dengan jumlah Produk Domestik Bruto (PDRB) tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 324,215,200 (Juta Rupiah) dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,97%. Diikuti Kabupaten Sidoarjo sebesar 112,012,900 juta rupiah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar

5,24% dan Kabupaten Pasuruan sebesar 80,105,400 (Juta Rupiah) dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,38%. 3 daerah yang memiliki nilai Produk Domestik Regional Bruto terendah pada tahun 2015 yaitu Kota Pasuruan sebesar 4,813,300 (Juta Rupiah) dengan pertumbuhan ekonomi 5,52%, Kota Mojokerto sebesar 3,991,400 (Juta Rupiah) dengan pertumbuhan sebesar 5,74% dan yang terendah adalah Kota Blitar sebesar 3,856,900 (Juta Rupiah). Rendah atau tingginya jumlah Produk Domestik Regional Bruto pada beberapa Kabupaten/Kota disebabkan faktor diantaranya, perbedaan kondisi geografis, penggunaan sumber daya, serta pengelolaan pemerintah.

4.2.2 Gambaran Umum Variabel Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Timur

Dengan adanya Undang-undang tentang otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan penuh dalam mengelola daerah. Ada banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah guna meningkatkan perekonomian daerahnya dalam mengelola daerahnya. Salah satunya melalui kebijakan pengeluaran pemerintah. Kebijakan pengeluaran pemerintah khususnya dalam pendistribusian anggaran memerlukan perhatian lebih. Karena pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak bisa lepas dari peranan pemerintah. Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah pengeluaran public atau secara spesifik adalah pengeluaran pemerintah. Dengan dianggarkannya dana dari APBD untuk pengeluaran pemerintah, diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang. Secara umum gambaran dari investasi pemerintah yaitu infrastruktur fisik dan pembangunan manusia diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, dari segi keuangan khususnya pengeluaran akan menghambat pertumbuhan. Berikut adalah nilai dari pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.3 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015 (dalam persen)

Kabupaten/ Kota	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Bangkalan	-4.60	7.07	12.13	44.81
Banyuwangi	41.71	13.89	37.96	25.22
Blitar	39.92	47.41	16.46	31.95
Bojonegoro	108.81	27.49	70.35	10.52
Bondowoso	23.97	19.25	24.03	29.88
Gresik	25.44	162.04	25.38	11.53
Jember	77.44	28.39	12.32	3.51
Jombang	183.42	11.43	63.64	13.57
Kediri	33.36	-3.05	11.26	40.77
Lamongan	42.45	-11.43	47.22	29.95
Lumajang	21.09	19.62	45.20	2.31
Madiun	56.19	-1.61	29.08	36.86
Magetan	-10.57	-0.65	45.68	25.52
Malang	59.14	-5.99	14.89	42.41
Mojokerto	46.29	0.00	58.74	34.57
Nganjuk	61.55	30.03	15.90	30.23
Ngawi	-21.55	54.89	28.93	28.38
Pacitan	10.15	-13.47	50.86	33.79
Pamekasan	23.77	-26.76	64.84	85.90
Pasuruan	59.87	5.60	32.16	42.19
Ponorogo	51.42	-42.68	59.66	83.16
Probolinggo	15.28	-18.77	3.76	56.56
Sampang	21.77	13.46	38.64	77.98
Sidoarjo	98.34	24.90	33.25	35.45
Situbondo	29.06	69.81	22.86	4.81
Sumenep	47.04	13.90	25.48	33.25
Trenggalek	6.74	53.43	35.89	16.43
Tuban	16.72	8.82	35.65	6.69
Tulungagung	59.15	-30.27	106.11	40.89
Kota Batu	-38.44	138.07	-12.33	106.32
Kota Blitar	-44.87	17.82	17.87	33.26
Kota Kediri	79.76	-34.42	23.33	13.62
Kota Madiun	43.58	31.12	11.89	-9.49
Kota Malang	67.52	31.67	-9.85	6.02
Kota Mojokerto	112.31	-36.66	109.31	-3.97
Kota Pasuruan	-12.52	11.86	39.52	46.06
Kota Probolinggo	-20.86	-19.53	56.87	-30.52
Kota Surabaya	68.05	40.39	9.60	27.11
Jawa Timur	38.14	15.56	27.83	28.84

Sumber: Lampiran A (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3 nilai pengeluaran pemerintah dari tahun 2012 – 2015 cenderung mengalami peningkatan. Terlihat dari nilai pertumbuhan pengeluaran pemerintah Jawa Timur selalu mengalami peningkatan, meskipun tren nilai pertumbuhannya cenderung mengalami penurunan. Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, nilai pertumbuhan pengeluaran pemerintah sangat fluktuatif. Daerah yang tren nilai pertumbuhan pengeluarannya mengalami penurunan yaitu, Kota Surabaya, Sidoarjo dan Pasuruan. Hal ini mengindikasikan bahwa peranan pemerintah di Kabupaten/Kota tersebut mengalami penurunan. Begitu juga dengan Kabupaten/Kota yang tren pertumbuhan pengeluarannya mengalami kenaikan yaitu Pamekasan, Probolinggo dan Kota Batu. Meningkatnya pertumbuhan investasi pemerintah tersebut, menunjukkan bahwa peranan pemerintah semakin tinggi dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi.

Meningkatnya jumlah pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Timur mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah juga meningkat. Meningkatnya pengeluaran pemerintah khususnya bagi pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di daerahnya. Rendahnya atau tingginya nilai pengeluaran pemerintah tergantung pada bagaimana pemerintah mengalokasikan anggarannya untuk investasi. Perbedaan sistem pengelolaan daerah akibat adanya undang-undang tentang otonomi daerah merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab perbedaan nilai pengeluaran pemerintah di tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.4 Kabupaten/Kota dengan Nilai Pengeluaran Pemerintah Tertinggi dan Terendah Tahun 2014-2015

Kabupaten/ Kota	Tahun		Pertumbuhan
	2014	2015	
Kota Surabaya	1,404,366	1,785,125	27%
Sidoarjo	691,163	936,193	35%
Malang	501,504	714,193	42%
Kota Pasuruan	108,979	159,178	46%
Kota Mojokerto	141,592	135,969	-4%
Kota Probolinggo	106,923	74,292	-31%

Sumber: *Lampiran A (diolah)*

Berdasarkan Tabel 4.4 Kota Surabaya adalah daerah dengan jumlah pengeluaran pemerintah yang tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,785,125 (Juta Rupiah) dengan nilai pertumbuhan 27%. Diikuti Kabupaten Sidoarjo sebesar 936,193 (Juta Rupiah) dengan nilai pertumbuhan 35% dan Kabupaten Malang sebesar 714,193 (Juta Rupiah) dengan nilai pertumbuhan 42%. Ada 3 daerah yang nilai pengeluaran pemerintahnya terendah di Provinsi Jawa Timur yaitu, Kota Pasuruan sebesar 159,178 (Juta Rupiah) dengan nilai pertumbuhan 46%, Kota Mojokerto sebesar 135,969 (Juta Rupiah) dengan nilai pertumbuhan minus (-) 4%, dan terendah adalah Kota Probolinggo sebesar 74,292 (Juta Rupiah) dengan nilai pertumbuhan minus (-) 31% pada tahun 2015.

4.2.3 Gambaran Umum Investasi Swasta di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel 4.5 nilai investasi swasta di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012 – 2015 selalu mengalami peningkatan. Terlihat dari nilai pertumbuhan investasi swasta Provinsi Jawa Timur yang selalu mengalami pertumbuhan, meskipun nilai pertumbuhannya cenderung fluktuatif. Di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur nilai pertumbuhan investasi swasta juga sangat fluktuatif. Fluktuatifnya nilai investasi swasta di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur diduga akibat naik-turunnya minat investor dalam menginvestasikan modalnya di Provinsi Jawa Timur. Tingginya nilai investasi swasta di suatu daerah menunjukkan bahwa, peran swasta tinggi dalam perkenomian. Namun secara keseluruhan, investasi swasta di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan.

Tabel 4.5 Pertumbuhan Investasi Swasta Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015
Tahun 2012-2015(dalam persen)

Kabupaten/ Kota	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Bangkalan	60.07	32.34	-11.94	10.65
Banyuwangi	19.73	-8.24	12.20	4.63
Blitar	12.23	14.58	16.19	60.21
Bojonegoro	71.85	43.53	12.42	10.22
Bondowoso	34.33	26.82	1.25	28.79
Gresik	37.65	81.88	-55.08	-57.88
Jember	42.46	103.25	-43.29	12.38
Jombang	1349.79	-72.58	28.30	-64.94
Kediri	-32.23	6.78	15.76	-2.09
Lamongan	-29.03	85.32	735.60	-30.45
Lumajang	33.23	6.79	7.77	7.92
Madiun	24.33	6.90	9.55	35.98
Magetan	29.03	12.24	20.15	20.78
Malang	-76.17	-57.78	128.15	-40.32
Mojokerto	57.45	57.01	-8.78	-13.28
Nganjuk	-91.34	202.41	-57.22	183.64
Ngawi	24.92	148.61	-39.08	107.14
Pacitan	129.13	-37.53	42.13	17.25
Pamekasan	26.81	5.77	19.56	20.92
Pasuruan	-45.01	97.24	-75.45	10.56
Ponorogo	20.94	9.65	29.28	17.97
Probolinggo	-0.11	87.37	-98.21	6541.91
Sampang	-5.95	-52.85	148.99	1819.27
Sidoarjo	-71.91	-23.58	31.32	-22.42
Situbondo	22.96	27.45	27.34	58.85
Sumenep	-	145.69	63843.68	-63.01
Trenggalek	26.63	10.23	11.50	19.77
Tuban	-96.40	42.07	808.38	-89.55
Tulungagung	18.14	20.83	23.42	19.40
Kota Batu	16.93	28.17	31.87	26.92
Kota Blitar	24.93	10.90	28.52	16.58
Kota Kediri	10.47	19.60	5.05	9.15
Kota Madiun	15.57	18.49	11.75	9.82
Kota Malang	9.75	33.34	1.99	18.89
Kota Mojokerto	68.26	-12.40	8.21	99.35
Kota Pasuruan	23.23	22.56	286.33	-62.48
Kota Probolinggo	7.34	17.84	36.75	14.56
Kota Surabaya	15.21	-73.82	-26.35	487.72
Jawa Timur	-22.68	30.31	-34.62	54.27

Sumber: *Lampiran A (diolah)*

Meskipun investasi swasta di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan, peningkatan atau pertumbuhan tersebut dirasa kurang kondusif oleh

pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kondisi tersebut dikarenakan masih adanya berbagai macam masalah eksternal ataupun masalah internal terkait investasi swasta yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sehingga masalah tersebut berdampak pada kurang maksimalnya dalam penyerapan minat investor untuk menanamkan modal di Jawa Timur. Rendah atau tinggi nilai investasi swasta di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur disebabkan oleh pengetahuan masyarakat dalam menyisihkan sebagian dananya untuk diinvestasikan, serta daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.6 Kabupaten/Kota dengan Nilai Investasi Swasta Tertinggi dan Terendah Tahun 2014-2015

Kabupaten/ Kota	Tahun	
	2014	2015
Probolinggo	260,371.99	17,293,676.44
Kota Surabaya	945,612.24	5,557,505.46
Lamongan	4,160,831.56	2,893,676.34
Kota Pasuruan	117,465.01	44,073.38
Kota Blitar	36,949.30	43,075.31
Bangkalan	30,480.16	33,725.31

Sumber: Lampiran A (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.6 Probolinggo adalah daerah dengan jumlah pengeluaran pemerintah yang tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 17,293,676.44 (Juta Rupiah) dengan nilai pertumbuhan 27%. Diikuti Kota Surabaya sebesar 5,557,505.46 (Juta Rupiah) dengan nilai pertumbuhan 35% dan Kabupaten Lamongan sebesar 714,193 (Juta Rupiah) dengan nilai pertumbuhan 42%. Hal ini disebabkan di Probolinggo, Kota Surabaya, dan Lamongan sedang terjadi pembangunan yang menyebabkan nilai investasi swasta meningkat. Ada 3 daerah yang nilai pengeluaran pemerintahnya terendah di Provinsi Jawa Timur yaitu, Kota Pasuruan sebesar 44,073.38 (Juta Rupiah) dengan nilai pertumbuhan 46%, Kota Blitar sebesar 43,075.31 (Juta Rupiah) dengan nilai pertumbuhan minus (-) 4%, dan terendah adalah Bangkalan sebesar 33,725.31 (Juta Rupiah) dengan nilai pertumbuhan minus (-) 31% pada tahun 2015.

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Pengujian Model Data Panel

Uji *Redundant Fixed Effect* adalah bertujuan untuk menentukan secara tepat model yang digunakan antara *fixed Effect* atau *random Effect*. Selain itu, uji Hausman adalah uji yang digunakan untuk menentukan secara tepat model yang digunakan antara *fixed Effect* atau *random Effect*. Metode *fixed effect* digunakan untuk mengestimasi data panel dengan cara mengetahui adanya perubahan dalam intersep menggunakan variabel dummy. Metode *random effect* digunakan untuk mengestimasi data panel dimana residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.

Untuk pemilihan model secara tepat spesifikasi model yang akan digunakan dalam data panel model fixed effect atau model random effect dapat dilihat pada tabel 4.7 dan 4.8 berikut:

Tabel 4.7 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	687.691318	(37,112)	0.0000
Cross-section Chi-square	825.382979	37	0.0000

Sumber: Lampiran C (diolah)

Tabel 4.8 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	99.044557	2	0.0000

Sumber: Lampiran C (diolah)

Berdasarkan tabel 4.7, hasil dari uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas $(0,0000) < \alpha = 0,05$. Nilai probabilitas signifikan, yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga metode yang paling tepat adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Pada hasil Uji Hausman diketahui nilai probabilitas

$0,0000 < \alpha = 0,05$, yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga metode yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

4.3.2 Analisis Regresi Data Panel

Pengujian analisis regresi data panel dilakukan dengan model bagaimana pengaruh Pengeluaran pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berikut hasil regresi data panel dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* pada hasil regresi antara variabel independen Pengeluaran pemerintah dan Investasi Swasta dengan variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Data Panel dengan Pendekatan *Fixed Effect*

Dependent Variabel: PERTUMBUHAN				
Method: Panel Least Squares				
Date: 04/24/18 Time: 11:03				
Sample: 2012 2015				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 38				
Total panel (balanced) observations: 152				
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.59901	0.152046	96.01691	0.0000
INVESTASI_PEMERINTAH	0.168558	0.012759	13.21125	0.0000
INVESTASI_SWASTA	0.004095	0.004920	0.832205	0.4071
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.998471	Mean dependent var	16.75074	
Adjusted R-squared	0.997939	S.D. dependent var	0.964177	
S.E. of regression	0.043772	Akaike info criterion	-3.198710	
Sum squared resid	0.214591	Schwarz criterion	-2.402952	
Log likelihood	283.1020	Hannan-Quinn criter.	-2.875445	
F-statistic	1875.723	Durbin-Watson stat	1.958408	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Lampiran B (diolah)

Berdasarkan tabel 4.9, hasil regresi data panel menggunakan pendekatan *Fixed Effect* menunjukkan bagaimana pengaruh variabel independen pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{Log Growth} = 14.59901 + 0.168558 \text{ Log IP} + 0.004095 \text{ Log IS} + \varepsilon$$

Berdasarkan analisis hasil regresi data panel dengan metode *fixed effect* dalam tabel 4.9 diatas, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Nilai koefisien di Provinsi Jawa Timur sebesar rasio 14,59901 artinya apabila variabel pengeluaran pemerintah dan investasi swasta diasumsikan konstan, maka diperkirakan rasio variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur sebesar 14,59901 persen pertahun.
- b. Nilai koefisien variabel investasi pemerintah untuk Provinsi Jawa Timur memiliki nilai sebesar 0,168558. Pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Timur secara signifikan berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 0,05$, dengan nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil dari nilai signifikansi. Hal ini menunjukkan apabila variabel pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Timur naik 1 persen, maka variabel pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,16 % pertahun. Dengan asumsi variabel Investasi Swasta dianggap konstan.
- c. Nilai koefisien variabel investasi swasta untuk Provinsi Jawa Timur memiliki nilai sebesar 0,004095. Investasi swasta di Provinsi Jawa Timur secara signifikan berpengaruh positif dan tidak signifikan pada $\alpha = 0,05$, dengan nilai probabilitas 0,4071 lebih besar dari nilai signifikansi. Hal ini menunjukkan apabila variabel investasi swasta di Provinsi Jawa Timur naik 1 persen, maka variabel pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,004095 persen pertahun. Dengan asumsi variabel pengeluaran pemerintah dianggap konstan
- d. Nilai koefisien regresi tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menggambarkan pengaruh variabel pengeluaran pemerintah dan investasi swasta dengan asumsi konstan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Nilai positif koefisien menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota mengalami peningkatan sebesar nilai koefisien (dalam persen) dengan asumsi variabel pengeluaran pemerintah dan investasi swasta konstan. Sedangkan nilai negative koefisien menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sebesar nilai koefisien (dalam persen) dengan asumsi variabel pengeluaran pemerintah dan investasi swasta

tetap. Berikut adalah tabel hasil analisis koefisien regresi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur:

Tabel 4.10 Koefisien Regresi Pengeluaran pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/ Kota	Koefisien Regresi	Kabupaten/ Kota	Koefisien Regresi
Bangkalan	-0.158938	Pasuruan	1.375411
Banyuwangi	0.66449	Ponorogo	-0.496245
Blitar	-0.01459	Probolinggo	-0.041169
Bojonegoro	0.706659	Sampang	-0.525553
Bondowoso	-0.606175	Sidoarjo	1.543718
Gresik	1.29168	Situbondo	-0.604732
Jember	0.663452	Sumenep	0.076165
Jombang	0.101798	Trenggalek	-0.632253
Kediri	0.11997	Tuban	0.574937
Lamongan	0.038456	Tulungagung	0.091054
Lumajang	-0.028578	Kota Batu	-0.713439
Madiun	-0.621828	Kota Blitar	-1.533307
Magetan	-0.554384	Kota Kediri	1.3638
Malang	0.878522	Kota Madiun	-0.823986
Mojokerto	0.781227	Kota Malang	0.684423
Nganjuk	-0.308484	Kota Mojokerto	-1.483648
Ngawi	-0.55268	Kota Pasuruan	-1.278056
Pacitan	-0.747618	Kota Probolinggo	-0.935386
Pamekasan	-0.763037	Kota Surabaya	2.468326

Sumber: Lampiran B (diolah)

4.3.3 Uji Statistik

Uji statistik dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independent berpengaruh secara statistik terhadap variabel dependen, baik secara simultan ataupun secara individu.

a. Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independent dari pengeluaran pemerintah dan investasi swasta berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. Hasil dari Uji $F_{statistik}$ dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Cross-section fixed (dummy variabls)			
R-squared	0.998471	Mean dependent var	16.75074
Adjusted R-squared	0.997939	S.D. dependent var	0.964177
S.E. of regression	0.043772	Akaike info criterion	-3.198710
Sum squared resid	0.214591	Schwarz criterion	-2.402952
Log likelihood	283.1020	Hannan-Quinn criter.	-2.875445
F-statistic	1875.723	Durbin-Watson stat	1.958408
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Lampiran B (diolah)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.11, nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000000. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menjelaskan bahwa variabel pengeluaran pemerintah (*investasi_pemerintah*) dan investasi swasta (*investasi_swasta*) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

b. Uji Signifikansi Paramater Individual (Uji t)

Uji $t_{statistik}$ digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen pengeluaran pemerintah dan investasi swasta secara individual terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Hasil dari uji $t_{statistik}$ dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Parameter Individual (Uji t)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.59901	0.152046	96.01691	0.0000
INVESTASI_PEMERINTAH	0.168558	0.012759	13.21125	0.0000
INVESTASI_SWASTA	0.004095	0.004920	0.832205	0.4071

Sumber: Lampiran B (diolah)

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui besarnya pengaruh masing – masing variabel independen pengeluaran pemerintah dan investasi swasta sebagai berikut:

- 1) Nilai probabilitas t-statistik variabel pengeluaran pemerintah sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$),

yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menjelaskan bahwa secara parsial variabel pengeluaran pemerintah (investasi_pemerintah) berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

2) Nilai probabilitas t-statistik variabel investasi swasta sebesar 0,4071. Nilai tersebut lebih besar dari nilai tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), yang menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal tersebut menjelaskan bahwa secara parsial variabel investasi swasta (investasi_swasta) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

c. Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi (R^2), maka semakin maka model akan semakin tepat dalam menjelaskan variabel dependen, begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien determinasi (R^2) terletak antara 0 dan 1 dan nilai model akan semakin baik jika mendekati nilai 1. Hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Cross-section fixed (dummy variabls)			
R-squared	0.998471	Mean dependent var	16.75074
Adjusted R-squared	0.997939	S.D. dependent var	0.964177
S.E. of regression	0.043772	Akaike info criterion	-3.198710
Sum squared resid	0.214591	Schwarz criterion	-2.402952
Log likelihood	283.1020	Hannan-Quinn criter.	-2.875445
F-statistic	1875.723	Durbin-Watson stat	1.958408
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Lampiran B (diolah)

Berdasarkan analisis regresi data panel pada Tabel 4.13, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,998471, hal ini berarti bahwa 99,84% perubahan variabel pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel pengeluaran pemerintah dan investasi swasta. Sedangkan 0,16% disebabkan

oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam persamaan regresi seperti contoh: kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

4.3.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memperjelas dan memperkuat hasil analisis. Hal ini dikarenakan dalam model regresi yang dilakukan harus memperhatikan penyimpangan atas asumsi klasik, karena apabila asumsi klasik tidak terpenuhi maka variabel-variabel penjelas akan menjadi tidak efisien. Dalam regresi data panel, uji asumsi klasik ada tiga uji yang harus dilakukan terhadap satu model regresi, yaitu uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas. Berikut adalah hasil uji asumsi klasik:

a. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan multikolinearitas atas variabel dependennya atau tidak dengan membandingkan R^2 model dengan r^2 pada model auxiliary setiap variabel independennya. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas

	PERTUMBUHAN	INVESTASI_PEMERINTAH	INVESTASI_SWASTA
PERTUMBUHAN	1.000000	0.742578	0.630921
INVESTASI_PEMERINTAH	0.742578	1.000000	0.475456
INVESTASI_SWASTA	0.630921	0.475456	1.000000

Sumber: Lampiran D (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.14, menunjukkan bahwa koefisien antar variabel independen kurang dari 0,85, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam setiap variabel independen.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan *variansi* dalam semua pengamatan. Dengan terjadinya heteroskedastisitas pada model penelitian, hasil dari regresi OLS tidak bias, tetapi tidak efisien (Gujarati, 2003). Berikut adalah tabel hasil dari uji heteroskedastisitas:

Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas

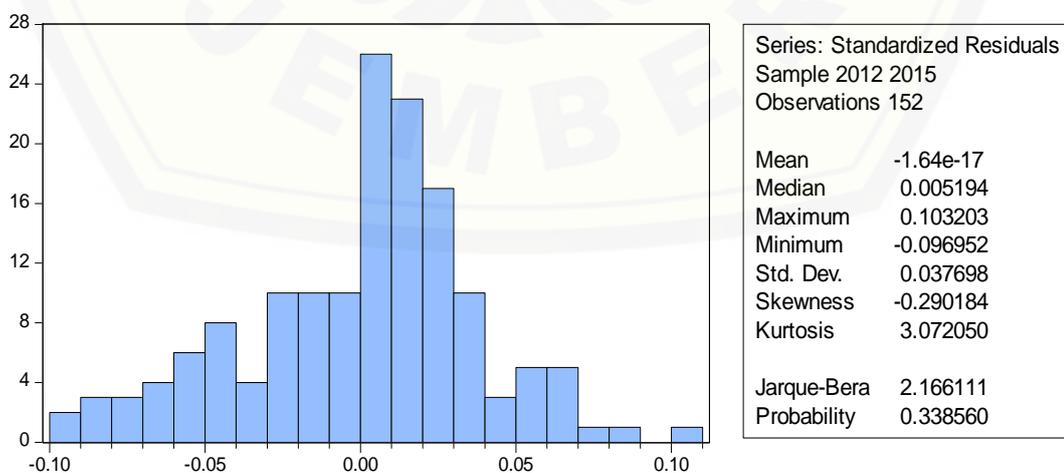
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.146543	0.078529	1.866106	0.0646
INVESTASI_PEMERINTAH	-0.006316	0.006590	-0.958442	0.3399
INVESTASI_SWASTA	-0.003159	0.002541	-1.243242	0.2164

Sumber: Lampiran D (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.15, menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas bahwa, nilai probabilitas dari semua variabel independent memiliki nilai diatas $\alpha = 0,05$. Hal itu menjelaskan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model dan mengindikasikan bahwa model bersifat homoskedastisitas.

c. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Konsep ini menggunakan pendekatan *Jarque-berra test* (JB-test). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Lampiran D (diolah)

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh variabel pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012- 2015. Berdasarkan hasil analisis data dengan metode data panel yang telah dilakukan, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Nilai koefisien variabel investasi pemerintah untuk 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki nilai sebesar 0,168558. Pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Timur secara signifikan berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 0,05$, dengan nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil dari nilai signifikansi. Hal ini menunjukkan apabila variabel pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Timur naik 1 persen, maka variabel pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,16 % pertahun. Dengan asumsi variabel Investasi Swasta dianggap konstan.
- b. Nilai koefisien variabel investasi swasta untuk 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki nilai sebesar 0,004095. Investasi swasta di Provinsi Jawa Timur secara signifikan berpengaruh positif dan tidak signifikan pada $\alpha = 0,05$, dengan nilai probabilitas 0,4071 lebih besar dari nilai signifikansi. Hal ini menunjukkan apabila variabel investasi swasta di Provinsi Jawa Timur naik 1 persen, maka variabel pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,004095 persen pertahun. Dengan asumsi variabel pengeluaran pemerintah dianggap konstan.
- c. Nilai koefisien regresi tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang berbeda-beda variabel pengeluaran pemerintah dan investasi swasta dengan asumsi konstan kurang merata di Jawa Timur.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa keterbatasan dan saran, yaitu:

- a. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga diharapkan bagi pemerintah provinsi maupun

pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggarannya khususnya pengeluaran untuk investasi secara tepat dan tepat, sehingga mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dan pembangunan di daerah bisa terlaksana.

- b. Investasi swasta berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga diharapkan bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah mampu menerapkan kebijakan yang merangsang investor baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk menginvestasikan modalnya di Provinsi Jawa Timur. Dengan meningkatnya penanaman modal di Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada capaian pembangunan di daerah.
- c. Perlunya penggunaan data *time series* yang lebih panjang atau lama untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kebijakan yang dilakukan membutuhkan proses untuk menunjukkan hasil dari kebijakan tersebut.
- d. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini masih terbatas karena hanya melihat pengaruh dari variabel pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, diperlukan studi lanjutan yang lebih mendalam dengan data dan metode yang lebih lengkap sehingga dapat melengkapi hasil penelitian yang telah ada dan dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk mewujudkan harapan dalam pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Jawa Timur Dalam Angka. Jawa Timur Tahun 2016*. Jawa Timur: BPS.
- Bancin, M. Siddik. 2009. Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Investasi Swasta Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Periode 1978-2007. *Tesis*. Depok: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Bank Indonesia. 2015. *Statistika Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Timur 2015*.
- Bappeda Provinsi Jawa Timur. 2017. *Data Dinamis Provinsi Jawa Timur*. Jawa Timur: Bappeda
- Bawuno, E. E., J. B Kalangi dan J. I Sumual. 2015. Pengaruh Pengeluaran pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 15 (4): 245 – 254.
- Boediono. 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4*. Yogyakarta: BPF.
- Deddy Rustiono. 2008. Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah”. *Tesis*. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Pustaka LP3ES.
- DPJKP Kementerian Keuangan. 2017. *Realisasi APBD 2010-2015*. <http://dpjkp-kemenkue.go.id>. [diakses pada tanggal 10 November 2017].
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Febriananda, Fajar. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Dalam Negeri di Indonesia Periode Tahun 1988 – 2009. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Herrick, Bruce dan Charles Kindlerberger P . 1988. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Gujarati. Damodar N. 2003. *Basic Econometrics Fourth Edition*. New York: Mc Graw-Hill.

- Iddris, Amiruddin. 2016. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Korua, s. F., v. A. Rimate dan h. F. Dj siwu. 2016. Pengaruh Pengeluaran pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Tenaga Kerja Sebagai Intervening Variabel Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2003-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 16 (1): 410 – 417
- Maharani, Kurnia dan Sri Isnowati. 2014. Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. 21 (1): 62 – 72.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1997. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw N, Gregory. 2006. *Makroekonomi*. Edisi Ke Enam, Terjemahan Fitria Liza, S.E dan Imam Nurmawa, S.E. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nachrowi, D. dan H., Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
- Naufal, Aldian Akbar. 2014. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Eks Karesidenan Besuki Tahun 2004 - 2012. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Jember.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007. *Pengeluaran pemerintah*. 10 Januari 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24. Jakarta
- Puspitasari, Dwi. 2016. Pengaruh Investasi Publik, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Regional di Provinsi Jawa Timur. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Raharjo, Adi. 2006. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Semarang Tahun 1982-2003. *Tesis*. Semarang: Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Rahman, J. A., Aris Soelistyo dan Syamsul Hadi. 2016. Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Di Propinsi Banten Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 14 (2): 112 – 121.

- Ramayani, Citra. 2013. Pengaruh Pengeluaran pemerintah, Investasi Swasta, Inflasi, Eksport, Tenaga Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal of Economic and Economic Education*. 1 (2): 203 - 207
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus. 1993. *Pengantar Ekonomi Edisi Ke Empat Belas*. Jakarta: Erlangga.
- Singarimbun, M., dan Effendi, S. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Sodik, Jamzani. 2007. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 12 (1): 27 – 36.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi:Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Sularno, Fitria M. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Sulistiawati, Rini. 2012. Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*. 3 (1): 29 – 50.
- Suryanto, Dwi. 2011. Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Subosukawonosraten Tahun 2004-2008. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Todaro, M.P. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Terjemahan. Cetakan keempat. Jakarta: Ghalia, Indonesia.
- Todaro, M. P. 2000. *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. Jakarta: Bumi Aksara
- Todaro, M. P. and S. C Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi 9*. Alih Bahasa. Jakarta: Erlangga.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dirjen PUOD, Jakarta.
- Wahyuni, I. G. A. P., Made Sukarsa, Nyoman Yuliarni. 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 3 (8): 458 – 477.

Widarjono, A. 2005. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

LAMPIRAN A

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2012 – 2015 (Juta Rupiah)

Kabupaten/ Kota	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)			
	2012	2013	2014	2015
Bangkalan	16,173,700	16,204,000	17,369,200	16,906,800
Banyuwangi	37,235,700	39,733,600	42,005,700	44,529,900
Blitar	18,054,500	18,967,300	19,920,200	20,925,500
Bojonegoro	38,136,100	39,039,400	39,934,800	46,892,800
Bondowoso	9,583,400	10,140,100	10,652,400	11,179,600
Gresik	67,248,800	71,314,200	76,336,000	81,360,400
Jember	37,262,000	39,519,200	41,971,700	44,222,600
Jombang	19,514,800	20,672,300	21,793,200	22,960,200
Kediri	20,538,300	21,733,500	22,890,000	24,007,700
Lamongan	18,562,700	19,848,800	21,099,900	22,316,900
Lumajang	16,053,400	16,949,600	17,851,900	18,676,900
Madiun	9,135,700	9,654,100	10,169,700	10,704,900
Magetan	9,251,200	9,792,600	10,291,700	10,823,900
Malang	47,076,000	49,571,700	52,550,400	55,317,800
Mojokerto	39,047,300	41,608,400	44,292,000	46,792,300
Nganjuk	12,767,000	13,456,000	14,142,900	14,875,400
Ngawi	9,568,200	10,094,000	10,681,000	11,223,100
Pacitan	7,705,000	8,157,600	8,582,200	9,019,500
Pamekasan	7,894,000	8,375,200	8,846,200	9,316,900
Pasuruan	70,167,100	75,044,000	80,105,400	84,415,700
Ponorogo	10,038,400	10,554,500	11,104,500	11,687,900
Probolinggo	16,936,800	17,808,900	18,682,200	19,571,000
Sampang	10,910,900	11,623,800	11,632,900	11,874,500
Sidoarjo	93,543,900	99,992,500	106,434,300	112,012,900
Situbondo	9,411,600	9,993,800	10,572,400	11,086,500
Sumenep	17,665,000	20,218,100	21,476,900	21,750,600
Trenggalek	8,959,500	9,496,700	9,998,500	10,501,600
Tuban	31,816,300	33,678,800	35,519,900	37,256,000
Tulungagung	18,999,000	20,164,300	21,265,200	22,326,600
Kota Batu	7,473,600	8,018,600	8,572,100	9,145,900
Kota Blitar	3,236,600	3,446,800	3,649,600	3,856,900
Kota Kediri	63,185,100	65,408,800	69,232,900	72,945,500
Kota Madiun	6,937,700	7,470,700	7,965,300	8,455,400
Kota Malang	35,355,700	37,547,700	39,724,700	41,952,100
Kota Mojokerto	3,358,400	3,566,700	3,774,600	3,991,400
Kota Pasuruan	4,051,200	4,315,100	4,561,300	4,813,300
Kota Probolinggo	5,552,100	5,911,300	6,261,900	6,628,800
Kota Surabaya	265,892,100	286,050,700	305,947,600	324,215,200
Jawa Timur	1,124,464,600	1,192,789,800	1,262,684,500	1,331,395,000

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (diolah)

Data Pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012 – 2015
(Juta Rupiah)

Kabupaten/ Kota	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Bangkalan	276,400	295,943	331,829	480,529
Banyuwangi	355,482	404,860	558,547	699,416
Blitar	224,421	330,813	385,260	508,332
Bojonegoro	247,573	315,627	537,687	594,229
Bondowoso	210,600	251,145	311,495	404,577
Gresik	159,429	417,766	523,805	584,224
Jember	372,744	478,577	537,521	556,409
Jombang	194,719	216,973	355,049	403,220
Kediri	301,492	292,282	325,197	457,788
Lamongan	271,049	240,072	353,436	459,306
Lumajang	136,316	163,056	236,757	242,225
Madiun	188,552	185,515	239,470	327,742
Magetan	131,917	131,066	190,933	239,657
Malang	464,305	436,502	501,504	714,193
Mojokerto	230,227	230,227	365,470	491,830
Nganjuk	184,104	239,383	277,439	361,296
Ngawi	122,174	189,236	243,988	313,226
Pacitan	153,539	132,855	200,429	268,152
Pamekasan	199,461	146,092	240,818	447,686
Pasuruan	234,131	247,248	326,768	464,634
Ponorogo	193,382	110,848	176,984	324,169
Probolinggo	260,068	211,260	219,199	343,189
Sampang	225,078	255,373	354,057	630,157
Sidoarjo	415,278	518,683	691,163	936,193
Situbondo	155,801	264,571	325,053	340,683
Sumenep	194,361	221,374	277,785	370,141
Trenggalek	134,758	206,760	280,962	327,137
Tuban	245,496	267,153	362,402	386,656
Tulungagung	219,556	153,095	315,546	444,587
Kota Batu	65,462	155,843	136,627	281,882
Kota Blitar	90,964	107,175	126,326	168,337
Kota Kediri	189,846	124,499	153,549	174,463
Kota Madiun	137,366	180,111	201,534	182,413
Kota Malang	268,292	353,265	318,462	337,648
Kota Mojokerto	106,798	67,646	141,592	135,969
Kota Pasuruan	69,832	78,112	108,979	159,178
Kota Probolinggo	84,707	68,162	106,923	74,292
Kota Surabaya	912,716	1,281,395	1,404,366	1,785,125
Jawa Timur	8,628,395	9,970,561	12,744,913	16,420,890

Sumber: DPJKP Kemenkeu (diolah)

Data Investasi Swasta Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012 – 2015 (Juta Rupiah)

Kabupaten/ Kota	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Bangkalan	26,154	34,612	30,480	33,725
Banyuwangi	411,255	377,365	423,422	443,019
Blitar	88,896	101,858	118,346	189,599
Bojonegoro	65,239	93,637	105,268	116,026
Bondowoso	38,207	48,456	49,060	63,186
Gresik	5,083,739	9,246,263	4,153,779	1,749,474
Jember	323,588	657,700	373,011	419,190
Jombang	2,097,742	575,216	737,986	258,716
Kediri	371,278	396,456	458,942	449,343
Lamongan	268,695	497,944	4,160,832	2,893,676
Lumajang	237,556	253,688	273,389	295,051
Madiun	194,343	207,761	227,593	309,484
Magetan	98,421	110,472	132,727	160,301
Malang	507,549	214,291	488,908	291,786
Mojokerto	1,813,400	2,847,172	2,597,211	2,252,330
Nganjuk	72,647	219,690	93,976	266,553
Ngawi	49,332	122,643	74,717	154,770
Pacitan	69,559	43,454	61,763	72,420
Pamekasan	43,585	46,099	55,117	66,647
Pasuruan	2,082,465	4,107,512	1,008,246	1,114,747
Ponorogo	113,040	123,948	160,242	189,035
Probolinggo	7,764,807	14,548,567	260,372	17,293,676
Sampang	8,600	4,055	10,096	193,772
Sidoarjo	2,340,904	1,788,874	2,349,230	1,822,516
Situbondo	57,586	73,390	93,454	148,452
Sumenep	2,075	5,099	3,260,356	1,205,891
Trenggalek	62,253	68,625	76,518	91,646
Tuban	135,072	191,894	1,743,138	182,100
Tulungagung	159,924	193,234	238,485	284,746
Kota Batu	44,745	57,348	75,622	95,982
Kota Blitar	25,926	28,751	36,949	43,075
Kota Kediri	98,339	117,616	123,559	134,870
Kota Madiun	66,605	78,920	88,195	96,853
Kota Malang	120,831	161,119	164,325	195,360
Kota Mojokerto	47,284	41,423	44,825	89,360
Kota Pasuruan	24,809	30,405	117,465	44,073
Kota Probolinggo	98,800	116,422	159,206	182,392
Kota Surabaya	4,903,045	1,283,844	945,612	5,557,505
Jawa Timur	30,018,296	39,115,822	25,572,420	39,451,349

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan BPM Provinsi Jawa Timur (diolah)

LAMPIRAN BHasil Analisis Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: PERTUMBUHAN
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/24/18 Time: 11:03
 Sample: 2012 2015
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 152

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.59901	0.152046	96.01691	0.0000
PENGELUARAN_PEMERINTAH	0.168558	0.012759	13.21125	0.0000
INVESTASI_SWASTA	0.004095	0.004920	0.832205	0.4071

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.998471	Mean dependent var	16.75074
Adjusted R-squared	0.997939	S.D. dependent var	0.964177
S.E. of regression	0.043772	Akaike info criterion	-3.198710
Sum squared resid	0.214591	Schwarz criterion	-2.402952
Log likelihood	283.1020	Hannan-Quinn criter.	-2.875445
F-statistic	1875.723	Durbin-Watson stat	1.958408
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN CHasil Uji Chow (*Chow-Test*)

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	687.691318	(37,112)	0.0000
Cross-section Chi-square	825.382979	37	0.0000

Hasil Uji Hausman (*Hausman-Test*)

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

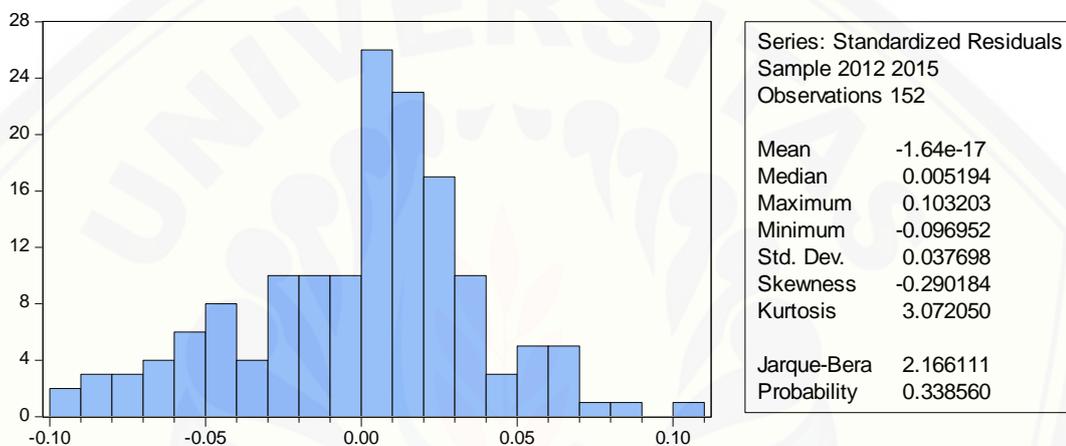
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	99.044557	2	0.0000

LAMPIRAN D

Hasil Uji Multikolinearitas

	PERTUMBUHAN	INVESTASI_PEMERINTAH	INVESTASI_SWASTA
PERTUMBUHAN	1.000000	0.742578	0.630921
PENGELUARAN_PEMERINTAH	0.742578	1.000000	0.475456
INVESTASI_SWASTA	0.630921	0.475456	1.000000

Hasil Uji Normalitas



Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/24/18 Time: 11:05
 Sample: 2012 2015
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 152

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.146543	0.078529	1.866106	0.0646
PENGELUARAN_PEMERINTAH	-0.006316	0.006590	-0.958442	0.3399
INVESTASI_SWASTA	-0.003159	0.002541	-1.243242	0.2164

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.325897	Mean dependent var	0.029208
Adjusted R-squared	0.091164	S.D. dependent var	0.023714
S.E. of regression	0.022607	Akaike info criterion	-4.520152
Sum squared resid	0.057242	Schwarz criterion	-3.724394
Log likelihood	383.5315	Hannan-Quinn criter.	-4.196887
F-statistic	1.388376	Durbin-Watson stat	2.528802
Prob(F-statistic)	0.093904		